

**ANALISIS PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURWOREJO**

SKRIPSI



MMK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

No. Induk :

SFS

S
Klas

338.9

NUG

a

@.1

Novianto Eko Agung Nugroho

NIM. D1A195021

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERANAN SEKTOR BASIS TERHADAP PRIORITAS
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DATI II PURWOREJO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : NOVIANTO EKO AGUNG NUGROHO

N. I. M. : DIAI95021

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

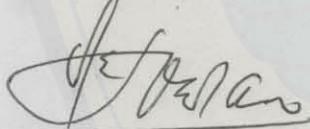
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

26 JULI 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130 355 409

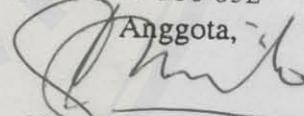


Sekretaris,



Drs. Badjuri, ME

NIP. 131 386 652

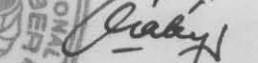
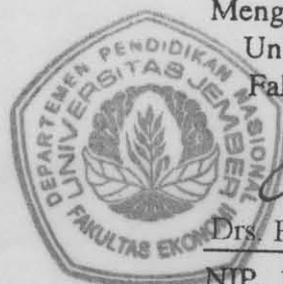


Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

Dekan,


Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Sektor Basis Terhadap Prioritas Pembangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo

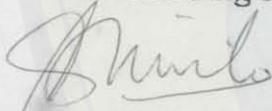
Nama Mahasiswa : Novianto Eko Agung Nugroho

Nomor Induk Mahasiswa : D1A1 95 021

Jurusan : IESP

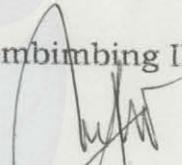
Konsentrasi yang Menjadi Dasar Penulisan Skripsi : Perencanaan Dan Industri

Pembimbing I



Drs. J. Sugiarto, SU
NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Dra. Anifatu Hanim
NIP. 131 953 240

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM
NIP. 130 676 291

Tanggal persetujuan : Juni 2002

MOTTO

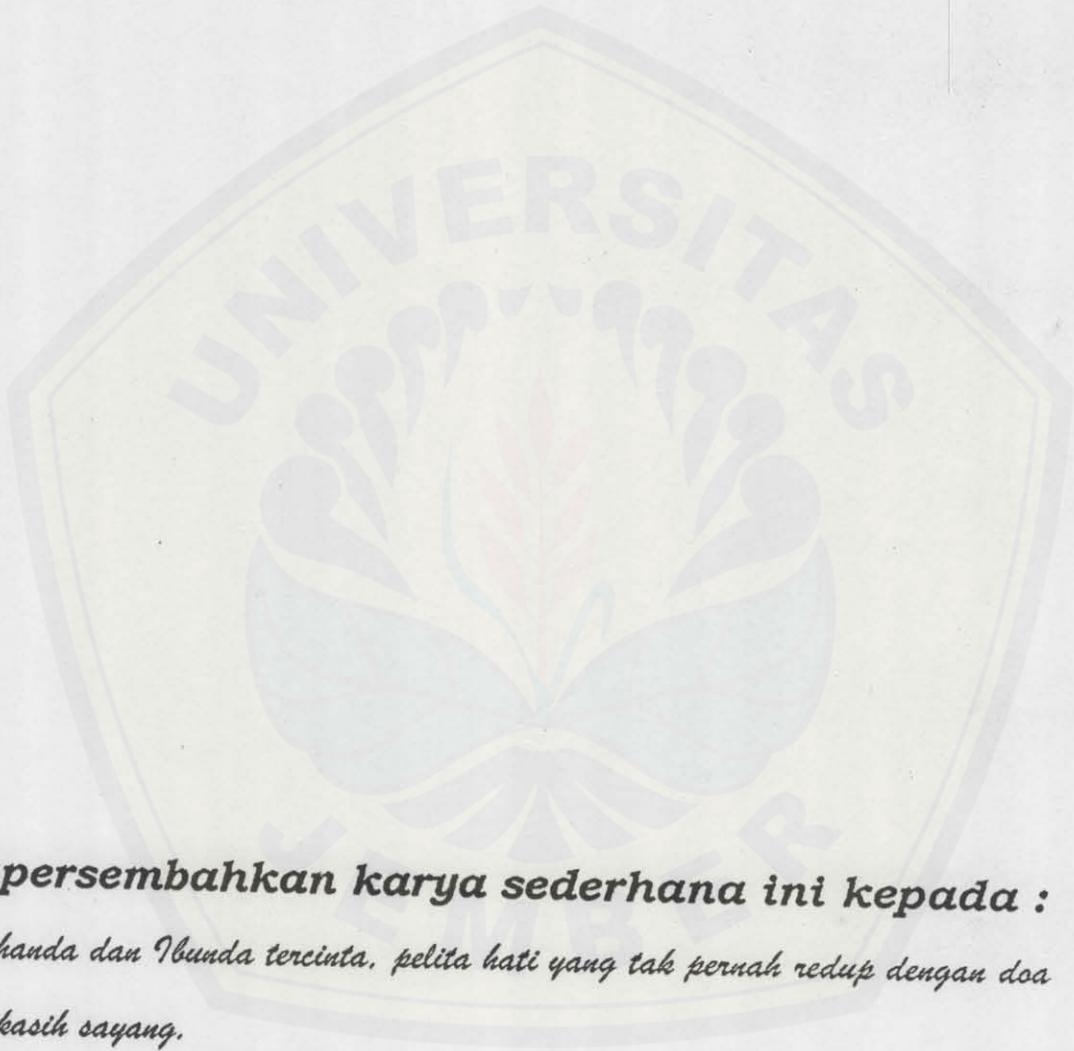
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah -lah hendaknya kamu berharap”.

(Qs. Al Insyiroh ayat 6- 8)

“ Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah dan bermakna “

(H.A Mukti Ali)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta, pelita hati yang tak pernah redup dengan doa dan kasih sayang.

Adikku (Heni), yang selalu memberi dorongan

Ratnaku tersayang selama ini memberiku motivasi dan membuatku lebih hidup

Almamatunku yang kbanggakan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Mengingat bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta segenap karyawan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi , atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
2. Drs. J. Sugiarto , SU selaku pembimbing I dan Dra. Anifatul Hanim selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan - masukan yang sangat berarti demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Purworejo.
4. Kantor PEMDA Kabupaten DATI II Purworejo.
5. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.

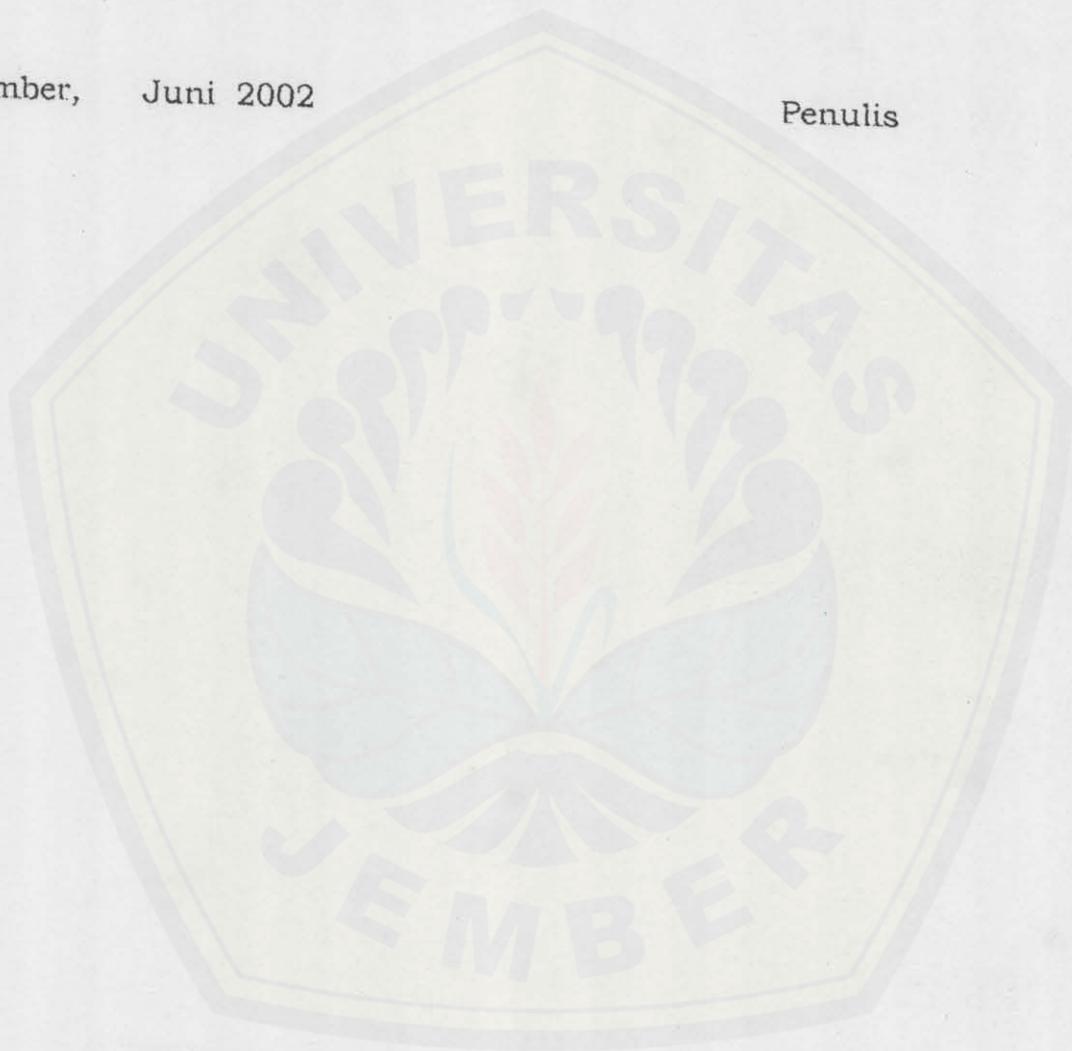
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah di berikan.

Penulis akan menerima dengan kerendahan hati semua koreksi, kritik dan saran yang mengarah pada penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua , Amien.

Jember, Juni 2002

Penulis



DAFTAR ISI

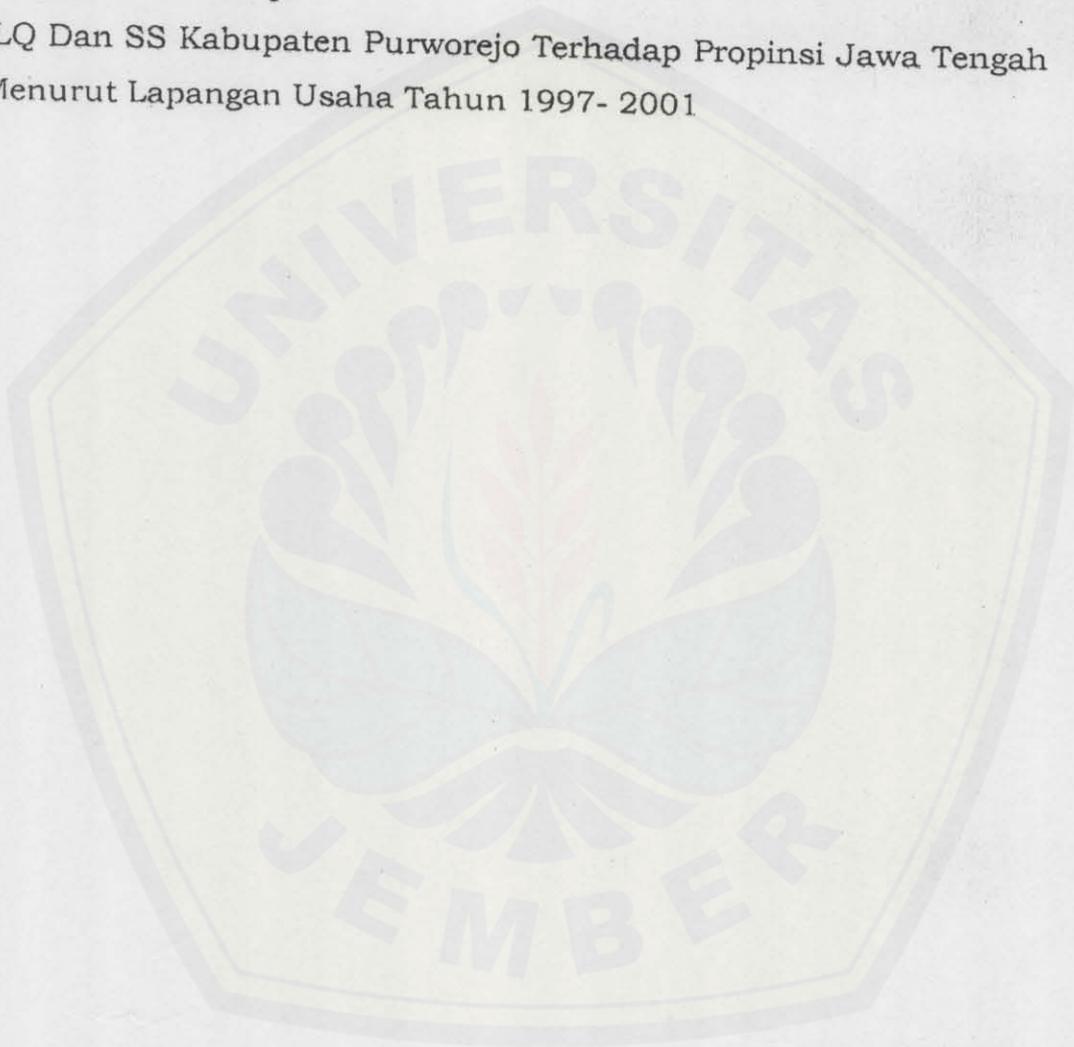
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Masalah..... 1
1.2	Perumusan Masalah..... 4
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5
	1.3.1 Tujuan Penelitian..... 5
	1.3.2 Manfaat Penelitian..... 6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1	Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya..... 7
2.2	Landasan Teori..... 9
	2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi..... 9
	2.2.2 Teori Ekonomi Basis..... 10
	2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto..... 11
	2.2.4 Penentuan Prioritas Pembangunan..... 15
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1	Rancangan Penelitian..... 21
3.2	Daerah Penelitian..... 21
3.3	Jenis Dan Unit Penelitian..... 21
	3.3.1 Jenis Penelitian..... 21

	3.3.2 Unit Penelitian.....	22
	3.4 Prosedur Pengumpulan Data	22
	3.5 Metode Analisis Data.....	22
	3.6 Definisi Variabel Operasional Dan Pengukuranya...	25
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum.....	26
	4.1.1 Letak Geografis.....	26
	4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwo rejo.....	27
	4.1.3 Distribusi PDRB Kabupaten Purworejo me nurut Sektor	29
	4.1.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Purwo rejo	30
	4.1.5 Peran Kabupaten Purworejo Dalam Konteks Jawa Tengah.....	32
	4.2 Analisis Data.....	34
	4.2.1 Diskripsi Hasil Penelitian	34
	4.2.2 Penetapan Sektor Prioritas.....	37
	4.2.3 Analisis DLQ.....	44
	4.3 Analisis Shift Share.....	47
	4.4 Pembahasan.....	49
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan.....	55
	5.2 Saran.....	57

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Purworejo Tahun 1998-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
2.	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purworejo Tahun 1998-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
3.	Struktur Perekonomian Kabupaten Purworejo Tahun 1997-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
4.	Kontribusi PDRB Kabupaten Purworejo Terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
5.	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Purworejo Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
6.	Kontribusi Sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
7.	Hasil Perhitungan LQ Per Sektor Kabupaten Purworejo Tahun 1997-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
8.	Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 1997-2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993	
9.	Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan, Dan Jasa Perusahaan Kabupaten Purworejo Tahun 2000-2001 Menurut Harga Konstan 1993	
10.	Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalan Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993	
11.	Hasil Perhitungan DLQ Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993	

12. Hasil Perhitungan DLQ Sektor Listrik, Gas, Dan Air Bersih Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
13. Faktor Struktural Dan Faktor Lokasional Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo
14. LQ Dan SS Kabupaten Purworejo Terhadap Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997- 2001



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
1.	PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1997- 2001
2.	PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1997- 2001
3.	Perhitungan LQ Tahun 1997 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
4.	Perhitungan LQ Tahun 1998 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
5.	Perhitungan LQ Tahun 1999 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
6.	Perhitungan LQ Tahun 2000 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
7.	Perhitungan LQ Tahun 2001 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
8.	Perhitungan Rata- Rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Tahun 1997- 2001 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993
9.	Perhitungan Rata- rata Laju Pertumbuhan Persektor Tahun 1997- 2001 Proinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993
10.	Perhitungan DLQ Per Sektor Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 1993
11.	Perhitungan Rata- Rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Listrik, Gas Dan Air Bersih, Sub Sektor Bangunan, Sub Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi, Dan Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan, Dan Jasa Perusahaan

Tahun 1997- 2001 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993

12. Perhitungan Rata- Rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Listrik, Gas, Dan Air Bersih, Sub Sektor Bangunan, Sub Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi, Dan Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan , Dan Jasa Perusahaan Tahun 1997- 2001 Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993
13. Perhitungan DLQ Sub Sektor Industri Pengolahan , Listrik, Gas Dan Air Bersih, Sub Sektor Bangunan, Sub Sektor Pengangkutan, Dan Komunikasi Dan Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan, Dan Jasa Perusahaan Tahun 1997- 2001 Kabupaten Purworejo

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sektor yang secara potensial dapat ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan di Kabupaten DATI II Purworejo di tahun yang akan datang dan dampak ekonomi dari reposisi sektor prioritas dimasa sebelumnya. Data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Purworejo dan Propinsi Jawa Tengah tahun 1997- 2001 atas harga konstan 1993.

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor prioritas di Kabupaten Purworejo selama tahun 1997- 2001 adalah LQ (Location Quetient) dan untuk mengetahui sektor prioritas di masa yang akan datang adalah Dynamic Location Quetient (DLQ) , sedangkan untuk mengetahui dampak ekonomi dari reposisi sektor prioritas dimasa yang lalu digunakan alat analisis Shift Share (SS) .

Menurut analisis LQ maka pada tahun 1997- 2001 diketahui ada tiga sektor yang dominan menjadi sektor basis. Sektor- sektor tersebut meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan Dan Penggalian, Dan sektor Jasa- jasa.

Hasil penelitian menurut analisis DLQ menunjukkan bahwa sektor Pertanian yang sebelumnya dijadikan sektor prioritas tidak dapat lagi diharapkan menjadi sektor prioritas di masa yang akan datang sedangkan sektor Industri pengolahan, Sektor Listrik, Gas, dan air bersih, Sektor Bangunan, Sektor pengangkutan dan komunikasi, dan Sektor Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan dapat di jadikan sebagai sektor prioritas pembangunan di masa yang akan datang di Kabupaten DATI II Purworejo .

Dengan menggunakan pendekatan Shift Share maka dapat di ketahui bahwa Sektor Listrik, gas dan air bersih, Sektor Keuangan ,persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor Jasa- jasa nampaknya masih dapat dipertahankan untuk masa mendatang. Kelemahan yang dialami oleh Kabupaten Purworejo adalah kelemahan lokasional dimana dominasi beberapa sektor ternyata justru mengurangi kemanfaatan sektor lain, sementara sektor yang dominan kurang memberikan keuntungan yang dominan karena laju pertumbuhan sektor ini kalah bersaing dengan laju sektor yang sama di tingkat II yang lain di Jawa Tengah.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan proses sosial, ekonomi dan institusional serta mencakup usaha- usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik (Todaro, 1983). Pembangunan di Indonesia diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang dua puluh tahunan dan jangka pendek lima tahunan. Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta menyebarkan hasil- hasil pembangunan ke berbagai daerah.

Salah satu tujuan pembangunan regional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara implisit pertumbuhan ekonomi nasional adalah mencakup pertumbuhan ekonomi regional karena ekonomi nasional tidak dapat tumbuh tanpa adanya pertumbuhan ekonomidaerah. Dengan kondisi ini , tidak mengherankan jika pertumbuhan menjadi salah satu tujuan pembangunan regional. Oleh karena itu tujuan pembangunan regional harus konsisten dengan tujuan pembangunan nasional yang umumnya terdiri atas ; (1) mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang tepat ; (2) menyediakan kesempatan kerja yang cukup; (3) pemerataan pendapatan ; (4) mengurangi perbedaan dalam tingkat pendapatan serta kemakmuran daerah; (5) mengubah struktur perekonomian agar tidak berat sebelah (Kadariah ,1982).

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang menggambarkan adanya keanekaragaman potensi baik sumber daya alam , budaya, iklim, ekonomi maupun sumberdaya manusia masing- masing

daerah menyebabkan terjadinya tingkat pertumbuhan yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan regional yang terarah dengan melihat potensi- potensi pembangunan yang terdapat pada masing- masing wilayah (Nuryasman , 1996 ; 253).

Keadaan yang umum dijumpai pada negara- negara sedang berkembang adalah adanya ketimpangan pertumbuhan sektoral, dan kurang meratanya pertumbuhan ekonomi daerah . Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan, baik dalam menyumbang produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maupun dalam menyerap tenaga kerja. Di samping itu, sektor industri yang menurut sejarah pada negara- negara maju dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya terkonsentrasi di beberapa tempat atau daerah saja, sehingga dapat membawa dampak negatif terhadap daerah yang kurang maju.

Program pembangunan sektoral adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang , dan melalui pembangunan daerah agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar- benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah yang bertitik tolak pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing- masing daerah. Dengan adanya keunggulan Komparatif yang dimiliki daerah , maka diharapkan daerah tersebut mampu memberikan forward linkage dan backwash linkage bagi daerah lainnya. Dalam usahanya untuk menciptakan keunggulan komparatif tersebut , suatu daerah harus dapat mengorganisasikan secara baik bagi tata ruang kegiatan ekonomi dan sosial. Untuk itu diperlukan suatu tehnik pendekatan guna mengetahui sektor- sektor yang berpotensi , karena sektor

Inilah yang akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan daerah selanjutnya (Waparni, 1994 : 67).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang di mana pertumbuhan tersebut terjadi tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sedangkan tiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda. Dalam hal ini pemerintah menyediakan anggaran, yaitu berasal dari dua aspek yaitu tabungan pemerintah dan dari tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat berasal dari pemupukan melalui perbankan (perkreditan), dan lembaga keuangan ataupun bentuk penanaman modal. Perhitungan dalam tabungan masyarakat dilakukan berdasar perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dana tersebut dalam penggunaannya dibagi-bagi yaitu untuk anggaran rutin (perlengkapan administrasi pemerintahan, gaji pegawai negeri), anggaran pembangunan (pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan hankam. Sedangkan dana yang datang dari tabungan masyarakat di gunakan pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adanya keterbatasan dana anggaran tersebut menyebabkan perkembangan sektor- sektor tidak dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dibutuhkan adanya kebijaksanaan yang tepat dan terarah. Kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah dengan menentukan sektor basis, sektor tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi leading sektor .

Produk domestik regional bruto propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998

mengalami pertumbuhan sebesar 28,37 %, tahun 1999 sebesar 16,54 %, pada tahun 2000 besarnya 23,73 % , sedangkan pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan sebesar 2,8 %. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah tingkat II di propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo mencapai 1,57 %, pada tahun 1999 sebesar 1,92 % ,pada tahun pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten purworejo mulai stabil yaitu dilihat dari perkembangan ekonomi sebesar 1,867 %, pada tahun 2001 pertumbuhannya semakin meningkat sebesar 4,2 % (BPS Kabupaten DATI II Purworejo). Sektor- sektor yang menonjol di Kabupaten Purworejo adalah sektor pertanian , sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa- jasa. Ketiga sektor itu memberikan sumbangan yang besar dalam PDRB Kabupaten Purworejo.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 sebesar 1,56 yang begitu kecil tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo karena didukung oleh sektor yang tidak begitu terpengaruh dengan keadaan tersebut yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian dalam tahun 1997- 2001 memiliki andil yang besar dalam sumbangannya pada PDRB yaitu sebesar 50,3 % , sedangkan sektor sektor perdagangan , hotel dan restoran hanya memberi sumbangan sebesar 15 % , sektor jasa- jasa mencapai 13,8%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut maka dapat bersaing dengan beberapa daerah lain di propinsi Jawa Tengah yang mempunyai PDRB rata- rata di bawah PDRB Kabupaten Purworejo.

Adanya keterbatasan dana yang dimiliki Kabupaten Purworejo mengharuskan adanya suatu kebijaksanaan yang tepat dan terarah bagi pembangunan sehingga perlu dilakukan penetapan prioritas

pembangunan di masa yang akan datang. Prioritas pembangunan di tinjau dari segi ekonomi di tentukan berdasarkan kegiatan sektor dan sub sektor yang berpotensi .

1.2 Perumusan Masalah

Program pembangunan sektoral bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang. Adanya keterbatasan dana pembangunan mengharuskan adanya suatu kebijaksanaan yang tepat dan terarah bagi pembangunan sehingga perlu adanya penetapan prioritas sektoral untuk masa – masa yang akan datang. Sektor yang unggul ditahun ini belum tentu unggul ditahun mendatang. Sebaliknya sektor yang belum unggul pada saat ini mungkin akan unggul dimasa yang akan datang. Reposisi demikian dapat tergantung pada laju pertumbuhan setiap sektor daerah bagian dibandingkan laju pertumbuhan sektor itu didaerah himpunan. Dengan demikian sektor yang pada tahun ini dijadikan sebagai sektor prioritas belum tentu dimasa mendatang tetap sebagai sektor prioritas dan sektor yang bukan merupakan sektor prioritas tahun mendatang dapat dijadikan sebagai sektor prioritas, sehingga penting untuk diketahui sektor apa yang potensial dijadikan sebagai sektor prioritas di masa mendatang.

Penetapan sektor basis sebagai prioritas pembangunan yang ditunjukkan oleh metode LQ dan DLQ hanya menunjukkan posisi dan reposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah tanpa membahas akibat dari terjadinya reposisi tersebut. Persoalan ini sangat penting bagi daerah, terutama dalam mendeteksi kekuatan dan kelemahan daerah dalam proses reposisi tersebut. Analisis Shift Share ini membantu membantu memahami keuntungan dan

kerugian yang dialami oleh daerah akibat dari reposisi dan dampak totalnya terhadap pertumbuhan daerahnya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ;

1. sektor basis yang digunakan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Purworejo periode tahun 1997- 2001 ;
2. sektor basis di Kabupaten Purworejo di masa yang akan datang ;
3. pengaruh dari reposisi sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo ;

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ;

1. sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijaksanaan pengembangan sektor- sektor ekonomi yang terdorong guna menciptakan kesempatan- kesempatan kerja yang lebih luas di masa yang akan datang;
2. bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Yuwono (1999) dengan menganalisis LQ (*Location Quotient*) dapat diketahui bahwa di Kotamadya Salatiga mempunyai beberapa sektor prioritas yaitu sektor bangunan, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor listrik dan air bersih, sektor persewaan dan jasa usaha, dan sektor jasa lain. Dalam penelitiannya Yuwono juga menggunakan analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*) karena analisis LQ dinilai bersifat statis. Dengan analisis tersebut maka dapat diketahui sektor prioritas di Kotamadya Salatiga di masa yang akan datang, yaitu sama seperti sektor di atas kecuali sektor keuangan, sektor persewaan jasa usaha . Yuwono juga menambahkan ada dua sektor lagi yang dapat menjadi sektor prioritas di masa yang akan datang yaitu sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian.

Dalam penelitian ini Yuwono juga menggunakan alat analisis *Shift Share* yaitu untuk memahami keuntungan atau kerugian yang dialami oleh daerah . Menurut yuwono , jika dilihat dari TSS (*Total Shift Share*) maka Kotamadia Salatiga diuntungkan Rp 1,94 milyar dengan laju pertumbuhannya selama tiga tahun dibandingkan dengan laju pertumbuhan propinsi Jawa Tengah . Keuntungan tersebut hasil sumbangan dari faktor lokasional dan faktor struktural . Sumbangan faktor lokasional lebih besar dari faktor struktural yaitu sebesar 76 %.

Teori export base dikemukakan oleh North (dalam Glasson, 1987 : 101), mengatakan bahwa pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi pemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan, yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan ekstern dari daerah- daerah lain. Sektor ekspor penting sekali peranannya dalam pembangunan daerah karena sektor tersebut memberikan dua sumbangan penting kepada perekonomian suatu daerah, yaitu : (1) ekspor akan secara langsung menimbulkan kenaikan pada faktor- faktor produksi daerah dan pendapatan daerah ; (2) perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan atas produksi lokal (residentary industries), yaitu industri- industri daerah tersebut yang produksinya dipergunakan untuk memenuhi pasaran di daerah tersebut. Jadi teori ini memandang tingkat permintaan luar terhadap produk dari industri- industri ekspor daerah sebagai penentu strategik bagi pertumbuhan regional.

Teori resource base dikemukakan oleh Perloff dan Wingo (dalam Sadono Sukirno, 1985) yang menganalisis pertumbuhan daerah. Pembangunan daerah pada awalnya timbul sebagai akibat dari kesanggupan suatu daerah untuk menghasilkan barang- barang yang diperlukan oleh perekonomian nasional, dan mengekspornya dengan harga dan kualitas yang bersaing dengan barang yang sama tau sejenis yang diproduksi oleh daerah lain . Untuk itu kekayaan alam sangat penting peranannya dalam pembangunan daerah. Kesanggupan mengekspor suatu daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimilikinya itu akan meningkatkan pendapatan daerah melalui multiplier effect.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah (2000) dengan judul Analisis Penetapan Sektor Prioritas Sektoral di Kabupaten Jember menggunakan metode LQ dapat diketahui ada empat sektor prioritas di Kabupaten Jember pada tahun 1994- 1998 yaitu sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan ,hotel dan restoran, dan sektor persewaan bangunan dan jasa perusahaan.Mukaromah juga menggunakan analisis DLQ guna mencari atau mengetahui sektor Prioritas di masa yang akan datang. Di Kabupaten Jember dapat diketahui sektor prioritas di masa yang akan datang yaitu sektor pertambangan dan penggalian ,sektor persewaan bangunan dan jasa usaha, dan sektor perdagangan , hotel dan restoran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dihitung dari PDRB merupakan rata- rata tertimbang dari tingkat sektoralnya. Artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan besar namun pertumbuhannya lambat , maka hal ini akan mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi , maka sektor tersebut sekaligus menjadi lokomotif yang akan menarik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang secara total pertumbuhan ekonominya menjadi besar.

Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah . Dua teori yang populer , yang dikembangkan khusus untuk menjelaskan mengenai faktor- faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah teori export base dan teori resource base.

2.2.2 Teori Ekonomi Basis

Teori basis ekonomi dikembangkan atas dasar teori perdagangan dalam hal ini *comparativ advantage* yang dikenalkan oleh David Ricardo dan Mill yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ohlin, Losch dan Isard (Mc. Kee dalam Hadi Prayitno, 1996 : 224). Teori tersebut digunakan untuk menganalisis perdagangan antar daerah di dalam suatu negara dan hanya dikenal adanya dua jenis daerah yaitu basis dan non basis. Teori ini dikembangkan lebih lanjut dengan memperlihatkan sektor maupun daerah di mana struktur ekonomi daerah dapat diidentifikasi menurut kelompok sektornya sebagai sektor basis dan non basis.

Isard (dalam Hasbullah, 1994 : 367) menyatakan bahwa model kegiatan ekonomi basis adalah model analisis yang membagi sektor ekonomi menurut lokasi penjualan atau pemasaran. Sektor basis ekonomi diidentifikasi sebagai sektor yang kecuali memenuhi kebutuhan wilayah tersebut juga mengekspor ke luar wilayah. Dengan demikian sektor basis ekonomi tersebut sangat memainkan peranan sehingga peningkatan besarnya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi bukan basis atau sektor ekonomi lainnya. Di sisi lain ekonomi bukan basis merupakan kegiatan perekonomian yang bersifat lokal. Perkembangan ekonomi basis daerah juga meliputi lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli yang selanjutnya akan memberikan keterkaitan positif terhadap kegiatan ekonomi lainnya.

Hoover (dalam Hasbullah, 1994 : 313) mengatakan bahwa hal ini sangat penting artinya sebab dengan adanya kegiatan ekonomi basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap

barang dan jasa, serta menimbulkan kenaikan kegiatan ekonomi lainnya dalam suatu perekonomian regional.

Inti dari model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut yang berupa barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (immobile), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah atau daerah wisata dan sebagainya. Sektor (industri) yang seperti ini bersifat disebut sektor basis (Budiharsono, 1989 : 84).

Lebih lanjut Budiharsono mengatakan bahwa tenaga kerja dan pendapatan nasional pada sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (exogeneous), yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan ekspor dari wilayah tersebut. Di samping sektor basis, ada kegiatan-kegiatan sektor-sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani pekerja pada sektor basis dan kegiatan sektor basis itu sendiri. Kegiatan sektor pendukung seperti perdagangan dan pelayanan perseorangan, di sebut sektor non basis.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Deliarinov (1995;36) dan Lipsey et al (1995;39) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan usahanya di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada

faktor- faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tertentu .

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk , yaitu (Deliarnov 1995; 60) :

1. PDRB atas dasar harga yang berlaku, adalah semua pendapatan di nilai atas dasar harga yang berlaku pada masing- masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB;
2. PDRB atas harga konstan suatu tahun dasar, adalah semua pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata- mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

Perhitungan PDRB menurut Partadiredja (1994; 12) mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, yang dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu ;

1. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu daerah , sehingga dari perhitungan PDRB dapat diketahui suatu daerah merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa;
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu, di mana dalam perhitungan PDRB angka yang dicatat merupakan penjumlahan angka- angka selama jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun , yang dapat memberikan gambaran kenaikan dan dan penurunan , terjadinya perubahan struktur ekonomi atau tidak ;

3. Membandingkan perekonomian antar daerah, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain, sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan daerah tersebut (termasuk daerah maju atau terbelakang);
4. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah, yaitu dengan mengetahui besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada tiap- tiap sektor ekonomi , sehingga dengan peningkata pendapatan perkapita pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasi.

Produk Domestik Regional Bruto dapat di hitung dengan dua metode. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data daerah secara terpisah dengan data nasional sehingga hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi , yaitu mengalokasi pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokator.

Metode langsung dilakukan dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Partadiredja 1994 ; 33).

1. Pendekatan produksi yaitu menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing- masing total produk bruto tiap- tiap sektor atau sub sektor. Pendekatan ini

banyak digunakan pada perkiraan nilai tambah dari kegiatan - kegiatan produksi yang berbentuk barang seperti pertanian, industri, dan pertambangan. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksisebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2. Pendekatan pendapatan, yaitu nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang diperkirakan dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu, upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Sektor pemerintah dan usahanya yang sifatnya mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Bunga netto, sewa tanah dan keuntungan termasuk surplus usaha. Metode pendapatan ini lebih banyak digunakan pada sektor yang produksinya berupa jasa, seperti sektor lembaga keuangan dan sektor jasa- jasa, hal ini terutama disebabkan oleh tidak tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara.
3. Pendekatan pengeluaran yaitu bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Dilihat dari penggunaannya maka total supply dari barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto. Dipakai ekspor netto karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri saja, maka dari jumlah penyediaan perlu dikeluarkan kembali nilai impornya.

Metode tidak langsung yaitu menghitung pendapatan regional dengan mengalokasikan angka pendapatan nasional untuk tiap- tiap daerah dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan pada atas nilai produk bruto atau netto, jumlah produksi fisik , jumlah tenaga kerja , penduduk . Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi alokator ini dapat diperhitungkan prosentase bagian masing- masing daerah terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor atau sub sektor

2.2.1 Penentuan Prioritas Pembangunan

Salah satu tujuan dari kebijakan pembangunan adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat pengembangan atau kemakmuran antar daerah. Antara tujuan ini dan kenaikan pendapatan nasional atau perkapita dengan cepat terdapat pertentangan . Jika tekanan diberikan pada cepatnya kenaikan pendapatan ,maka akan akan banyak investasi yang akan diadakan daerah- daerah, yang memiliki banyak prasarana fisik ataupun non fisik. Akibatnya daerah yang sudah maju akan semakin maju dan daerah yang sulit berkembang akan lebih sulit lagi perkembangan perekonomiannya. Karena itu hampir semua negara sedang berkembang mengadakan usaha pembangunan terdiri dari daerah- daerah yang berbeda tingkat kemajuannya baik itu secara absolut maupun secara relatif, maka untuk mengurangi perbedaan dalam tingkat kemajuan itu perlu mendapat prioritas.

Dalam hal ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu; 1) kegiatan ekonomi yang melayani pasar daerah sendiri maupun daerah lain ; 2) kegiatan ekonomi yang melayani daerah sendiri saja atau lokal, golongan yang pertama merupakan

prioritas pembangunan sedangkan yang kedua bukan termasuk sektor non prioritas pembangunan (Kadariah, 1982 : 70).

Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah akan menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut , dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basic, tapi juga akan memajukan permintaan akan industri non basic. Oleh karena itu , industri basis patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah menggolongkan semua industri apakah termasuk industri basis atau non basis . Untuk Keperluan ini digunakan tehnik analisis Location Quotient (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian (Arsyad, 1997 : 291).

Rumus dari LQ adalah sebagai berikut : (Yuwono ,1999: 47).

$$LQ = \frac{X_{in} / Y_n}{X_i / Y}$$

di mana ;

LQ = perbandingan antara pangsa sektor i dari suatu daerah n dengan pangsa sektor i daerah himpunan

X_{in} = nilai tambah sektor i di daerah n

X_i = nilai tambah sektor i di daerah himpunan

Y_n = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah n

Y = PDRB daerah himpunan

Nilai LQ mulai dari 0 , dengan nilai 1 sebagai patokan menyatakan bahwa pangsa pasar sektor di daerah bagian sama dengan pangsa sektor di daerah yang lebih besar ,berarti jika $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukanlah sektor unggulan bagi daerah tersebut. Sebaliknya jika $LQ > 1$ maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai unggulan daerah tersebut, dan mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain. Semakin besar nilai LQ semakin besar pula daya saing sektor tersebut dibandingkan sektor itu di daerah lain dalam satu propinsi (Yuwono ,1999 : 47).

Kadariah (1985 : 72) menyatakan bahwa tehnik LQ memiliki kelemahan antara lain ;

1. Selera dan pola pengeluaran atau pola konsumsi dari masyarakat berlainan pada masing- masing daerah;
2. Tingkat konsumsi rata- rata untuk masing- masing barang tidak sama untuk tiap daerah;
3. Keperluan – keperluan untuk produksi dan juga produktifitas buruh berbeda untuk tiap daerah.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut diperlukan asumsi sebagai berikut :

1. Penduduk di setiap daerah memiliki pola permintaan yang sama dengan pola permintaan daerah yang lebih maju ;
2. Permintaan daerah akan barang pertama- tama dipenuhi dengan hasil daerah itu sendiri dan jika jumlah yang diminta melebihi jumlah produksi daerah tersebut maka kekurangannya didapat dari luar daerah.

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya sektor unggulan tahun ini belum tentu unggul di tahun yang akan datang.

Sebaliknya sektor yang tahun ini tidak unggul di masa yang akan datang mungkin bisa unggul. Sebagai alternatif dapat digunakan Dynamic Location Quotient (DLQ) . Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ , perbedaannya hanya pada asumsi yaitu pada DLQ di gunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata- rata laju pertumbuhan per tahun sendiri- sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t) . Tafsiran atas DLQ pada dasarnya masih sama dengan LQ , kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan . Jika $DLQ = 1$ berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan PDRB Propinsinya. Jika $DLQ < 1$ maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan daerah n lebih rendah jika dibanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya (propinsinya) , dan juga sebaliknya.

Dalam analisis DLQ , untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata- rata laju pertumbuhan pertahun sendiri- sendiri selama kurun waktu antara 0 dan tahun t (Yuwono , 1999 : 50).

$$DLQ = \frac{(1 + g_i)^t}{(1 + G)^t}$$

Tafsiran DLQ pada dasarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika suatu sektor memiliki $DLQ = 1$ berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju

pertumbuhan PDRB daerah himpunannya. Jika suatu sektor memiliki nilai $DLQ < 1$, maka proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah himpunan akan lebih rendah dibandingkan dengan laju proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya. Sebaliknya jika suatu sektor memiliki nilai $DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB daerah n lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya, dan pada masa yang akan datang, jika keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa sektor ini akan unggul dari persaingan.

Metode LQ maupun DLQ hanya membahas posisi dan reposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas dampak dari perubahan tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui dampak terjadinya reposisi sektoral tersebut. Pemahaman ini sangat penting dalam mendeteksi kekuatan dan kelemahan suatu daerah dalam proses reposisi tersebut. Untuk mengetahui dampak dari reposisi sektoral tersebut dapat di gunakan alat analisis Shift Share. Analisis ini membantu memahami keuntungan atau kerugian yang dialami oleh suatu daerah akibat dari reposisi tersebut dan melihat keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor lokasional atau faktor struktural. Selain itu dapat pula dikaji sektor-sektor yang memberikan keuntungan dan kerugian lokasional maupun struktural dan dampak totalnya dari pertumbuhan ekonomi daerah.

$$TSS = \sum (g_n - g_i) X_{ino} + \sum (G_i - G) X_{ino} + \sum (g_{in} - G_i) X_{ino}$$

Atau

TSS = Struktural Shift Share + Locational Shift Share

Struktural shift share adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan daerah himpunannya yang terjadi karena perbedaan pangsa pasar sektoral, kendati laju pertumbuhan sektoral daerah bagian maupun himpunan sama. Locational shift share adalah perbedaan laju pertumbuhan daerah bagian dengan daerah himpunannya yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral, kendati pangsa pasarnya sama (Yuwono, 1999 ; 53). Nilai 0 dari Struktural shift share maupun locational shift share menyatakan bahwa pangsa pasar daerah bagian sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral yang sama.

Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan atau kerugian yang di dapat daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan.

**BAB III
METODE PENELITIAN**



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif mengenai perkembangan perekonomian di Kabupaten Purworejo tentang sektor prioritas pembangunan, dan akibat dari reposisi sektor prioritas yang terjadi. Menurut Suparmoko (1994 : 20) penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.

3.2 Daerah Penelitian

Kabupaten DATI II Purworejo dipilih sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan :

1. sumbangan PDRB kabupaten Purworejo terhadap PDRB propinsi Jawa Tengah yaitu 3,8 % dari total PDRB Jawa Tengah.
2. kelayakan penelitian, yaitu ketersediaan cukup data yang diperlukan.
3. letak strategis untuk menghubungkan regional propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3 Jenis dan Unit Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan statistik korelatif. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik dari unit yang diteliti yaitu menggambarkan peranan sektor basis terhadap prioritas pembangunan di Kabupaten Purworejo. Statistik korelatif yaitu

untuk mencari hubungan secara statistik antara variabel independen dan dependen secara teliti.

3.3.2 Unit Penelitian

Unit penelitian yang digunakan adalah PDRB di Kabupaten Purworejo, PDRB Propinsi Jawa Tengah

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu memperoleh data dengan cara melihat dari laporan- laporan pihak lain atau dengan cara mencatat, menyalin data dari kantor terkait yaitu Biro Pusat Statistik, PEMDA kabupaten Purworejo.

3.5 Metode Analisis Data

untuk mengetahui :

- Sektor prioritas pembangunan di tahun 1997- 2001 digunakan Analisa Location Quotient (LQ) dengan rumusan sebagai berikut;

$$LQ = \frac{X_{in} / Y_n}{X_i / Y}$$

Di mana ;

X_{in} = PDRB persektor daerah bagian (Kabupaten Purworejo)

Y_n = total PDRB daerah bagian

X_i = Pdrb persektor daerah Himpunan (Propinsi Jawa Tengah)

Y = Total PDRB daerah himpunan

(Yuwono ,1999 ; 49)

- b. untuk mengetahui sektor yang dibasis yang digunakan untuk prioritas pembangunan di masa yang akan datang di gunakan analisa DLQ. (Dynamic Location Quetient) dengan rumusan sebagai berikut ;

$$DLQ = \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)^t}{(1 + G_i) / (1 + G)}$$

(Yuwono, 1999 ; 49)

di mana;

g_{in} = rata - rata laju pertumbuhan sektor i di kabupaten DATI II Purworejo

G_i = rata- rata laju pertumbuhan sektor i di propinsi Jawa Tengah

g_n = rata- rata laju pertumbuhan kabupaten Purworejo

G_n = rata- rata laju pertumbuhan Propinsi Jawa tengah

Kriteria DLQ ;

$DLQ = 1$,artinya laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB kabupaten Purworejo sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah ;

$DLQ < 1$, proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB kabupaten Purworejo lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Jawa Tengah; $DLQ > 1$, proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB kabupaten

Purworejo lebih cepat di banding dengan PDRB Jawa tengah .

Untuk menghitung rata- rata laju pertumbuhan digunakan rumus ;

$$g = (\sqrt[n-1]{P_n/P_1-1}) \times 100\%$$

di mana ;

- g = rata- rata laju pertumbuhan
- P1 = PDRB tahun awal periode
- Pn = PDRB tahun akhir periode
- n = jumlah tahun analisis

c. untuk mengetahui dampak dari reposisi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo digunakan alat analisis SHIFT SHARE (Yowono , 1999 : 53) ;

$$TSS = \sum (g_n - g_{in}) X_{ino} + \sum (G_i - G) X_{ino} + \sum (g_{in} - G_i) X_{ino}$$

Atau

$$TSS = \text{Structural Shift Share} + \text{Locational Shift Share}$$

di mana :

Structural Shift Share = perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan daerah himpunannya akibat perbedaan pangsa sektoral.

Locational Shift Share = perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah himpunannya karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral.

Nilai 0 dari stuktural shift share maupun locational shift share menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah bagian tepat sama dengan daerah himpunan, dedngan laju pertumbuhan sektoral yang

sama . Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan atau kerugian yang dialami daerah bagian atas, keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan.

3.6 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Untuk mempermudah dalam menelaah penelitian ini dan untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat perlu adanya batasan-batasan sebagai berikut ;

1. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto dihitung atas dasar harga konstan 1993.
2. Sektor atau sub sektor adalah sesuai dengan data PDRB menurut lapangan usaha yang terdiri dari sembilan sektor, yaitu ; (1) pertanian ; (2) penggalian dan pertambangan; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa .
3. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh angka- angka dalam PDRB yang disajikan atas dasar harga konstan 1993 baik secara menyeluruh maupun sektoral.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Daerah tingkat II Purworejo dengan luas wilayah 1034,80 km² terletak pada posisi 109° 47 ' 28 " Bujur Timur , 7° 32 ' sampai 7° 54 ' Lintang Selatan. Daerah Kabupaten DATI II berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian timur dan utara dikelilingi pengunungan yang memanjang sepanjang batas utara. Kabupaten Purworejo terletak pada jalur lalu lintas Yokyakarta – Purwokerto. Batas administratif kabupaten DATI II adalah sebelah utara Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, sebelah timur Daerah Istimewa Yokyakarta, dan batas administratif sebelah barat adalah Kabupaten Kebumen.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah rata- rata 85 meter diatas permukaan air laut dan merupakan dataran rendah yang cukup subur dan cocok untuk mengembangkan komoditi pertanian dan perkebunan sehingga Kabupaten Purworejo terkenal sebagai penghasil devisa terbesar di propinsi Jawa Tengah dengan komoditi andalan adalah padi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam berbagai kawasan yakni perkampungan, sawah, tegalan dan kebun campuran. Kabupaten Purworejo memiliki 16 kecamatan, 494 desa dan terdapat sekitar 760 283 jiwa penduduk (BPS Kabupaen DATI II Purworejo, 2001).

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten DATI II Purworejo

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun sehingga untuk mengetahuinya harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun (Arsyad, 1997 : 11) . Konsep yang lazim dipakai untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah menggunakan PDRB. Jika suatu sektor mempunyai peranan yang dominan tetapi pertumbuhannya lambat, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 1993 dapat dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Purworejo tahun 1997-2001 yaitu berturut- turut sebesar pada tahun 1998 pertumbuhan ekonominya sebesar 1,568, pada tahun 1999 sebesar 1,921, tahun 2000 pertumbuhan ekonomi kabupaten Purworejo sebesar 1,866 dan pada tahun 2001 sebesar 4,224. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan tingkat kegiatan ekonomi baik secara keseluruhan maupun secara sektoral . Untuk tahun 2000 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan adanya penurunan out put pada masing- masing sektor. Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan paling besar adalah sektor bangunan dengan pertumbuhan - 2,54% , sedangkan pada tahun sebelumnya diatas 2 % . Sektor- sektor lain seperti , sektor listrik, gas dan air bersih mengalami hal yang sama , yaitu dengan pertumbuhan 13,220 % dimana untuk tahun sebelumnya adalah sebesar 21,4 % .

Penurunan pertumbuhan pada tahun 2000 tersebut juga di sebabkan adanya dampak krisis ekonomi sehingga pada masing-masing sektor mengalami penurunan output yang cukup tajam. Sektor yang dominan justru mengalami pertumbuhan negatif seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan. Padahal sektor-sektor di atas memberikan kontribusi total terhadap PDRB kabupaten Purworejo sebesar 76.33 %. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor bangunan ditahun 2000 pertumbuhannya masing-masing berturut-turut adalah sebesar - 2,544 (lihat tabel 1).

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Purworejo Tahun 1998- 2001 Atas dasar Harga Konstan 1993 (dalam %)

No.	Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	1,339	0,076	0,310	0,309
2.	Pertambangan dan penggalian	3,382	2,858	16,522	14,179
3.	Industri Pengolahan	2,334	2,004	1,838	1,806
4.	Listrik, Gas dan Air bersih	13,104	21,143	13,220	11,676
5.	Bangunan	5,207	2,464	-2,544	5,221
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,494	0,866	1,276	1,260
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,919	6,325	14,657	12,783
8.	Keu, Persew.dan js.perus.	5,234	4,504	10,109	9,181
9.	Jasa- jasa	0,1652	1,630	1,231	1,216
TOTAL PDRB		1,568	1,921	1,866	4,224

Sumber : BPS Kab. Purworejo.

Selama kurun waktu 1997- 2001 sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 13,104 %, 21,143 %, 13,220 %, 11,676 %, 5,221 %, 1,260 %, 12,783 %, 9,181 %, 1,216 %.

13,220 % dan 11,676 % .Besarnya pertumbuhan ini di sebabkan oleh tingginya tingkat kegiatan ekonomi di sektor ini karena di tunjang oleh sarana dan prasarana yang mendukung lebih baik. Namun pada tahun 2000 seperti sektor lainya mengalami penurunan pertumbuhan. Selama kurun waktu 1997- 2001 pertumbuhan ekonomi sektoral terendah dialami oleh sektor perdagangan hotel dan restorant yaitu sebesar rata rata 1,1 % pertahun.

4.1.3 PDRB Kabupaten Purworejo menurut Sektor

Tiga sektor utama yang paling berpengaruh terhadap total PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa.Sumbangan terbesar diberikan oleh sektor pertanian, dimana untuk tahun 2001 sumbangan yang diberikan sebesar Rp.492.662,34 juta atau sebesar 44,67%. Hal ini disebabkan areal pertanian yang dimiliki sangat luas sehingga alokasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun modal banyak terserap untuk peningkatan produksi pertanian, sumbangan terbesar berikutnya diberikan oleh sektor jasa- jasa sebesar Rp.141.272,07 juta atau sebesar 14,7% dan sektor perdagangan ,hotel dan restoran sebesar Rp.125.822,41 juta atau sebesar 12.21%. Sumbangan terkecil diberikan oleh sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar Rp.8.684,58 juta atau sebesar 0.905% untuk tahun 2001 atau rata-rata 0.5% untuk tahun 1997- 2001. (lihat tabel 2).

Tabel 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Purworejo Tahun 1998- 2001 Atas dasar Harga Konstan 1993 (dalam juta rupiah

No. Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	466.298,00	470.305,25	471.764,56	492.662,34
2. Pertambangan Penggalian	18.585,64	19.116,92	22.275,54	25.434,16
3. Industri pengolahan	48.034,27	48.997,15	49.897,59	50.798,03
4. List., gas Dan air bersih	5.669,75	6.868,52	7.776,55	8.684,58
5. Bangunan	32.931,84	33.743,53	32.884,94	34.602,12
6. Perdag,hotel Dan restoran	121.435,73	122.689,49	124.255,95	125.822,41
7. Angkutan danKomunikasi	32.781,69	34.855,40	39.964,19	45.072,98
8. Keu,persewaan Jasa perush	27.631,14	28.875,87	31.795,00	34.714,13
9. Jasa- jasa	135.665,27	137.877,27	139.574,67	141.272,07
Total PDRB	886.303,33	903.329,43	320.188,99	959.062,82

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo.

4.1.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Purworejo

Untuk mengetahui struktur dari suatu perekonomian wilayah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga sektor. Pertama sektor primer (agriculture) , adalah kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumber daya alam secara langsung, tanpa ada proses pengolahan, yaitu meliputi kegiatan pertanian dan pertambangan . Kedua adalah sektor sekunder (manufacture), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi termasuk dalam kategori ini adalah industri pengolahan ,listrik, gas dan air bersih dan bangunan. Ketiga adalah sektor tersier (service) yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang tapi jasa, yaitu meliputi perdagangan, hotel dan restoran , pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan jasa perusahaan , jasa – jasa (BPS kab. Purworejo,2001 :39).

komunikasi, keuangan persewaan jasa perusahaan , jasa – jasa (BPS kab. Purworejo,2001 :39).

Struktur perekonomian Kabupaten Purworejo memiliki karakteristik di mana ada dua sektor yang didominasi, yaitu sektor Primer dan sektor tersier dengan proporsi lebih dari 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan yang di hasilkan pada sektor ini melebihi sektor lain. Untuk jelasnya kita lihat pada tabel 3.

Tabel 3. Struktur Perekonomian Kabupaten Purworejo Tahun 1997-2001 atas dasar harga konstan tahun 1993.

No.	Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Primer	54,2	54,44	54,2	53,6	52,6
2.	Sekunder	9,3	9,7	9,8	9,7	9,7
3.	Tersier	36,5	35,86	36,0	36,7	37,7
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

Aktivitas pembangunan khususnya bidang ekonomi akan mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke arah sekunder dan tersier. Pengertian tersebut bukan berarti bahwa Produksi sektor Primer secara kuantitas nilai absolutnya turun, namun diartikan kenaikan tingkat produktivitas sektor- sektor hilirnya. Kenyataan tersebut sangat wajar karena dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok sektor pertanian dan pertambangan tingkat produktivitasnya sangat tergantung pada tanah sedangkan dalam kenyataanya tanah yang digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Walaupun segala upaya intensifikasi pertanian menggunakan teknologi terapan tetap saja total

produktivitas tidak dapat begitu saja dinaikkan. Berbeda dengan sektor sekunder, modal dan teknologi sudah disediakan secara cepat untuk mendukung kenaikan produktivitas. Gambaran pergeseran juga terjadi di Kabupaten Purworejo. Namun mulai akhir Juni 1997 Krisis ekonomi mulai melanda perekonomian Indonesia sehingga pergeseran struktural sedikit terganggu. Walaupun terganggu namun pergeseran struktural ekonomi secara nyata masih dapat dikatakan terjadi di kelompok sektor primer ke kelompok sektor tersier, sedangkan untuk ke arah sektor sekunder belum begitu nyata, bahkan kontribusinya cenderung menurun. Pada tahun 1997 sumbangan kelompok primer masih sebesar 54,20 % namun empat tahun kemudian sudah turun menjadi 52,6 %. Penurunan kontribusi kelompok primer terkompensasi oleh kenaikan sektor tersier. Kontribusi tersebut pada tahun 1997 baru 36,5 % tapi tahun 2001 meningkat menjadi 37,7 %.

4.1.5 Peran Kabupaten Purworejo Dalam Konteks Jawa Tengah

Sumbangan Kabupaten Purworejo terhadap perekonomian Jawa Tengah masih relatif kecil, baik keseluruhan maupun berdasarkan sektor. Tabel 4 menunjukkan kontribusi kabupaten Purworejo terhadap propinsi Jawa Tengah tahun 1997- 2001 . Persentasi ini relatif kecil selama periode analisis yaitu berkisar antara 1,2 % sampai dengan 1,5 % yang membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo belum berhasil mencapai stabilisasi ekonomi sebagai realisasi perencanaan pembangunan daerah. Kontribusi kabupaten Purworejo terhadap perekonomian Propinsi Jawa tengah menunjukkan angka yang kecil karena total output dari sistem produksi atau pendapatan regional masih sedikit. Hal ini dipengaruhi

oleh ketersediaan sumber daya manusia maupun modal, di mana pemanfaatan sumberdaya tersebut masih kurang optimal .

Perbandingan sektoral antara Kabupaten Purworejo dengan Propinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan melihat kontribusi masing- masing sektor kabupaten Purworejo dalam perekonomian Jawa tengah . Sektor- sektor di Kabupaten Purworejo yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Jawa Tengah adalah sektor pertanian dengan kontribusi rata- rata sebesar 4,26 % dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,62 %.

Selama periode analisis , kontribusi sektor pertanian kabupaten Purworejo terhadap perekonomian Propinsi Jawa Tengah cenderung meningkat, kecuali untuk tahun 2001 . Penurunan kontribusi sektor pertanian di tahun 2001 ini di sebabkan adanya kenaikan harga pupuk yang tidak di sertai dengan kenaikan harga gabah . Kenyataan ini sama dengan kondisi sektor pertanian di Purworejo sendiri , dimana persentasenya semakin menurun , sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan kontribusi sektor pertanian Purworejo terhadap propinsi Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh naiknya kontribusi sektor pertanian di kabupaten lain di Jawa Tengah. Sektor di kabupaten Purworejo dengan kontribusi terkecil terhadap PDRB Jawa Tengah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih dengan kontribusi rata- rata pertahun 0,2 % .

Tabel.4. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Purworejo Terhadap Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997- 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (%).

No. Lap. Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	4,3	4,4	4,4	3,4	4,5
2. Pertambangan penggalian	0,4	0,37	0,57	0,64	0,67
3. industri Pengo lahan	0,97	0,98	0,97	0,99	0,7
4. Listrik,gas Dan air bersih	0,2	0,23	0,24	0,3	0,26
5. Bangunan	0,87	0,87	0,89	0,86	0,85
6. Perdag.,hotel, Dan restoran	1,3	1,4	1,44	1,52	1,541
7. Pengangkutan	0,84	0,86	0,87	0,85	0,86
8. Keu.,Persewaan Dan jasa perush	0,43	0,42	0,44	0,44	0,45
9. Jasa-jasa	1,5	1,6	1,8	1,87	1,9
PDRB	1,5	1,04	1,3	1,2	1,23

Sumber : BPS Kab. Purworejo

4.2 Analisis Data

4.2.1 Diskripsi Hasil Penelitian

Untuk mencapai tujuan pembangunan dalam setiap Repelita, proses pengambilan keputusan untuk menanam modal harus benar-benar dipertimbangkan, terlebih dalam memilih sektor- sektor yang harus diprioritaskan untuk menjamin terciptanya pembangunan yang lancar. Dengan demikian terbatasnya sumber daya dan modal akan dialokasikan pada sektor yang tepat, untuk itu perlu adanya penetapan sektor prioritas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB kabupaten Purworejo tahun 1997- 2001 atas dasar harga konstan 1993 yang terdiri dari sembilan sektor. Pemilihan tahun 1993

sebagai tahun dasar adalah karena : (1.) kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia pada tahun tersebut menunjukkan keadaan yang relatif stabil dibandingkan tahun- tahun sebelumnya ; (2.) tahun 1993 merupakan tahun akhir pelaksanaan PJPT I dan awal pelaksanaan PJPT II , sehingga tahun tersebut dapat di gunakan sebagai basis pembanding bagi perkembangan ekonomi tahun- tahun yang lain dalam repelita ; (3.) tidak dipengaruhi oleh inflasi sehingga nilai riil suatu barang tidak berubah (BPS Kabupaten Purworejo ,2001). Data PDRB Kabupaten Purworejo tahun 1997- 2001 atas dasar harga konstan 1993 dapat dilihat pada lampiran 1.

PDRB Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 1997- 2001 mengalami peningkatan pertumbuhannya dilihat dari besarnya PDRB yaitu sebesar Rp. 872.616,32 juta di tahun 1997 menjadi Rp. 959.062,82 juta di tahun 2001 atau naik sekitar 9,01 % (dapat dilihat pada lampiran 1). Selama kurun waktu 1997- 2001 sektor pertanian memberikan peranan paling dominan dengan rata-rata kontribusi sebesar 24,74%. Pada tahun 2000 kontribusi sektor ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya dimana di tahun 1997 kontribusi yang diberikan sebesar 24,74 % menjadi 20.41 % di tahun 2001. Namun sektor pertanian ini masih memegang prioritas dalam pengembangan perekonomian kabupaten Purworejo karena peranan strategisnya terhadap pembangunan ekonomi masih cukup besar. Kontribusi kedua di berikan oleh sektor jasa- jasa yaitu sebesar 14,73 % kemudian disusul oleh sektor perdagangan ,hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 13,12 % . (lihat tabel 5).

Tabel 5. Kontribusi Sektoral PDRB Kab. Purworejo Menurut Lapangan Usaha Tahun 1996- 2000 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (dalam %).

No.	Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian	53,2	52,3	52,0	51,3	50,7
2.	Pertambangan Dan penggalian	2,0	2,22	2,2	2,4	2,6
3.	Ind. pengolahan	5,3	5,4	5,4	5,4	5,2
4.	List.,gas,dan Air bersih	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
5.	Bangunan	3,5	3,7	3,7	3,5	3,6
6.	Perdag., hotel, restoran	13,5	13,7	13,8	13,8	14,1
7.	Angkutan dan Komunikasi	3,6	3,69	3,8	4,3	4,6
8.	Keu.,persewaan Jasa perush.	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6
9.	Jasa- jasa	15,4	15,3	15,2	15,1	14,7
	Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo 2000

Sektor perdagangan ,hotel dan restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu 13,5 % di tahun 1997 menjadi 14,1% di tahun 2001. Kontribusi sektor jasa- jasa sempat mengalami penurunan yaitu dari 15,4 % di tahun 1997 menjadi 14,7 %di tahun 2001 . Kontribusi terkecil di berikan oleh sektor listrik, gas, dan air besih dengan rata- rata sumbangan 0.5 % pertahun.

Data lain yang digunakan untuk menganalisis sektor basis yang nantinya akan dijadikan sektor prioritas adalah nilai tambah bruto tiap sektor yang terhimpun dalam PDRB propinsi Jawa Tengah tahun 1997- 2001 atas dasar harga konstan 1993 yang dapat dilihat dalam lampiran 2. Selama kurun waktu 1997- 2001 PDRB propinsi Jawa

tengah mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 60.296.426,87 juta di tahun 1997 menjadi Rp. 136.758.000,7 juta di tahun 2001 (lampiran 2).

Tabel 6. Kontribusi Sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997- 2001 Atas dasar Harga Konstan 1993 (dalam %)

No. Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	21,8	26,8	25,0	24,7	24,69
2. Pertambangan	1,1	1,0	1,2	1,6	1,78
3. Indus.pengolahan	32,0	27,59	29,1	28,8	28,64
4. Listrik,gas,airbersih	0,7	0,67	0,64	0,66	0,73
5. Bangunan	4,3	3,5	3,9	4,1	4,21
6. Perdag.,hotel dan Restoran	21,1	23,5	22,9	22,4	22,14
7. Pengangkutan Dan komunikasi	3,8	4,3	4,1	4,4	4,56
8. Keu.,persewaan Dan jasa perush.	5,4	3,66	3,6	3,8	3,89
9. Jasa- jasa	11,2	9,8	9,5	9,44	9,35
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber BPS Jawa Tengah , 2001

Sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah selama kurun waktu 1997- 2001 adalah sektor industri pengolahan , disusul sektor perdagangan , hotel dan restoran dan sektor pertanian (tabel 6). Sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling besar adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan komunikasi dan sektor perdagangan hotel dan restoran, dimana laju rata- rata masing- masing sektor berturut - turut adalah sebesar 29,57 % , 20,84 % , dan 17,20 % (lampiran 9).

4.2.2 Penetapan Sektor Prioritas ✓

Pendekatan sektor basis dipergunakan untuk mengetahui kemampuan sektor ekonomi dari suatu daerah dengan jalan

mengklasifikasikan seluruh kegiatan dalam dua golongan , yaitu sektor basis dan sektor non basis (Budiharsono, 1989 : 85). Sektor yang dapat mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri dan selebihnya diekspor ke daerah lain biasa disebut sektor basis .Sektor basis ini perlu mendapat perhatian karena sektor ini sangat berpotensi sebagai pendorong pertumbuhan regional sehingga dapat ditetapkan sebagai sektor prioritas.

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu indikator yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam kegiatan ekonomi didaerah. Jika suatu sektor memiliki nilai LQ lebih besar dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor yang kuat sehingga secara potensial merupakan pengeksport produksi dari sektor tersebut ke daerah lain atau dengan kata lain dijadikan leading sektor karena sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, sebaliknya jika suatu sektor memiliki nilai LQ kurang dari satu, maka sektor tersebut lemah dengan kata lain daerah tersebut menjadi pengimpor produk dari sektor tersebut.

Hasil penghitungan LQ pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 di tunjukkan pada lampiran 3,4,5,6 dan 7, dan berdasarkan perhitungan tersebut maka pada tahun 1997 terdapat tiga sektor basis yaitu sektor pertanian dengan nilai LQ sebesar 1,215175371, sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai LQ sebesar 1,810420148 dan sektor jasa- jasa dengan nilai LQ 1,380728105. Tahun 1998 terdapat empat sektor basis yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor jasa – jasa . Tahun 1999 terdapat empat sektor basis yaitu pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor jasa- jasa. Pada tahun 2000 terdapat tujuh sektor basis

yaitu sektor pertanian , sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan , persewaan bangunan dan jasa perusahaan, sektor jasa- jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Di tahun 2001 terdapat lima sektor prioritas yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengangkutan, keuangan dan sektor jasa- jasa (lihat tabel 7) .

Tabel 7. Hasil Perhitungan LQ Persektor Kabupaten Purworejo Tahun 1997- 2001 Atas dasar Harga Konstan 1993.

No. Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	1,215	1,023	1,039	1,305	1,261
2. Pertambangan	1,810	1,97	2,111	1,804	1,874
3. Industri	0,167	0,196	0,186	0,237	0,233
4. Listrik, gas, air	0,77	0,944	1,176	1,598	0,928
5. Bangunan	0,82	1,046	0,951	1,107	0,942
6. Perdag., hotel, rest.	0,65	0,582	0,591	0,757	0,752
7. Komunikasi	0,95	0,851	0,937	1,232	1,302
8. Keuangan	0,55	0,850	0,876	1,155	1,174
9. Jasa- jasa lain	1,38	1,548	1,605	2,023	1,989

Sumber : Lampiran 3, 4, 5, 6, 7 diolah

Sektor pertanian ini mengalami penurunan nilai LQ yaitu 1,215 ditahun 1997 menjadi 1,023 di tahun 1998. Sektor yang memiliki nilai LQ paling besar yaitu sektor jasa- jasa sebesar 1,989 di tahun 2001 . Sektor jasa- jasa mempunyai prospek yang cukup cerah, ini terbukti mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 mampu menjadi sektor basis yang dapat dilihat dari nilai LQ nya yaitu tahun 1997 sebesar 1,38, tahun 1998 sebesar 1,548 tahun 1999

sebesar 1,605, tahun 2000 sebesar 2,031 dan tahun 2001 sebesar 1,989. Sektor lain yang juga mempunyai prospek bagus adalah sektor keuangan, dan sektor pengangkutan, dimana untuk sektor keuangan pada tahun 2000 memiliki LQ 1,5511 dan pada tahun 2001 nilai Lqnya sebesar 1,174. Sektor pengangkutan pada tahun 2000 memiliki nilai LQ 1,232 dan pada tahun 2001 menjadi 1,3016.

4.2.2.1 Sektor Pertanian

Selama kurun waktu 1997- 2001 sektor pertanian memiliki sumbangan yang paling besar di PDRB kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan luas lahan di Kabupaten Purworejo sangat luas yaitu 103.481,75 Hayang terdiri lahan sawah dan lahan kering (perkebunan). Sistem pengairan di kabupaten Purworejo (irigasi) melalui sistem teknis yaitu melalui bendungan Pangenrejo. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian yaitu dari sub sektor tanaman bahan makanan (padi, dan ketela pohon). Tanaman perkebunan yang menonjol di kabupaten Purworejo yaitu perkebunan kelapa dan jeruk. Sub sektor peternakan yang menonjol adalah peternakan kambing etawa.

Tabel 8. Hasil perhitungan LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 1997- 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993.

No. Sub Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1. Tanaman Bhn. Mak.	1,2073	0,9210	0,9527	1,1213	1,1394
2. Tan. Perkebunan	0,2939	3,0268	3,5391	4,0084	3,3901
3. Peternakan	0,8776	0,5087	0,5098	0,9244	1,2308
4. Kehutanan	0,4293	1,4952	0,1893	0,2225	0,2106
5. Perikanan	0,6194	0,4535	5,2630	5,6536	5,1314

Sumber Data : Lampiran 3,4,5,6 dan 7

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir seluruh sub sektor pertanian pada tahun 1997 hanya sub sektor tanaman bahan makanan yang menjadi sub sektor basis, dalam hal ini tanaman bahan makanan yang dimaksud adalah jenis padi. Namun mulai tahun 1998 sampai 2001 sub sektor tanaman perkebunan mengalami kemajuan yang cukup pesat dan memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap sektor pertanian. Nilai LQ dari sub sektor tanaman perkebunan tahun 1998 menunjukkan bahwa sub sektor mampu menjadi sub sektor basis yaitu sebesar 3,02687 (lampiran 4).

Pada tahun 1999 sub sektor perikanan (tambak air tawar) memberikan sumbangan terbesar dalam sektor pertanian. Hal ini disebabkan pada tahun 1999 sedang digalakan sistem mina padi sehingga sektor perikanan meningkat produksinya. Hal ini juga dapat dilihat juga dari nilai LQ sub sektor ini yaitu 5,263042817 di tahun 1999.

4.2.2.2 Sektor Jasa- Jasa

Sektor jasa ini meliputi sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan dan sub sektor swasta. Pada sub sektor pemerintahan umum mencakup kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lain. Sumbangan pemerintahan umum terhadap PDRB terdiri dari belanja pegawai pemerintah dan perkiraan komponen upah dari bekerjanya pembangunan. Untuk sub sektor swasta sumbangan yang diberikan oleh jasa hiburan dan jasa kebudayaan

Sektor jasa- jasa menjadi sektor basis mulai tahun 1997 dengan nilai LQ 1,380728. Dan semakin meningkat pada tiap tahunnya, hingga pada tahun 2001 nilai Lqnya menjadi 1,9891176 (lampiran

3,4,5,6 dan 7 Sub sektor yang paling besar memberikan sumbangan terhadap PDRB adalah sub sektor pemerintahan dan pertahanan, sedang bila dilihat dari analisis LQ sektor ini dapat menjadi sub sektor basis karena LQ mempunyai nilai lebih dari 1.

4.2.2.3 Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan.

Sektor keuangan mempunyai beberapa sub sektor yaitu sub sektor bank, lembaga keuangan non bank, sewa bangunan, dan jasa perusahaan. Sub sektor bank meliputi semua bank yang ada di kabupaten Purworejo, baik itu bank pemerintah (misal; BNI, BRI) maupun bank swasta (BCA, BII, BPR).

Tabel 9. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Purworejo ADHK 1993.

No. Sub Sektor	2000	2001
1. Bank	1,31669	1,32340
2. Lembaga Keu. Non Bank	1,37727	2,64373
3. Sewa Bangunan	1,23117	1,25174
4. Jasa Perusahaan	0,23531	1,23202

Sumber : Lampiran 6 dan 7

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2000 tiga sub sektor keuangan, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan dapat menjadi sub sektor basis, terutama pada sub sektor bank hal ini disebabkan terjadi penambahan nasabah tiap tahunnya. Pada tahun 2001 sub sektor jasa perusahaan dapat menjadi sub sektor basis dengan nilai LQ 1,23202.

4.2.2.4 Sektor Bangunan dan Konstruksi

Berdasar PDRB tahun 1997- 2001 kontribusi sektor bangunan tidak begitu besar yaitu berkisar 3,5 % . Hal tersebut dikarenakan jumlah produk dari sektor bangunan ini tidaklah maksimal , karena kurangnya anggaran dari pemerintah dan investasi swasta untuk mendukung sektor ini. Berdasar hasil perhitungan LQ tahun 2000 , sektor ini mampu menjadi sektor basis dengan nilai sebesar 1,0172756 (lampiran 6) .Sektor ini hanya mampu menjadi basis pembangunan di tahun 2000 saja.

4.2.2.5 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Keberhasilan sektor pertambangan tidak terlepas dari kontribusi sub sektor penggalian yang sangat berperan. Di kabupaten Purworejo sub sektor ini mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB. Sub sektor ini terdiri dari mineral golongan c, yaitu meliputi (1) pasir , (2) pasir kwarsa, (3) kerikil dan (4) batu gamping. Ke empat mineral tersebut terdapat di kabupaten Purworejo misal batu gamping dan pasir kwarsa terdapat didaerah Grabag, Pasir di Bagelen. Tenaga kerja yang terserap di sektor ini sangatlah besar.

Sektor pertambangan menjadi sektor basis mulai tahun 1997 sampai tahun 2001, yaitu dengan nilai LQ sebesar 1,810420 di tahun 1997 dan di tahun 2001 menjadi 1,87503 (Lampiran 3,4,5,6,7).

Tabel 10. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Purworejo ADHK 1993.

No. Sub Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertambangan	-	-	-	-	-
2. Penggalian	1,8104	1,9703	2,112	1,8045	1,8754

Sumber : Lampiran 3,4,5,6,7

Pada tahun 2000 sektor ini menjadi sektor prioritas dengan nilai LQ sebesar 1,232715608 kemudian meningkat di tahun 2001 menjadi 1,30161601. (lampiran 6,7)

4.2.3 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Berdasarkan hasil perhitungan DLQ pada lampiran 10 dapat di ketahui bahwa sektor yang masih tetap dapat diprioritaskan untuk masa yang akan datang adalah sektor Industri pengolahan dengan nilai DLQ 1,511645705 , sektor Listrik, gas dan air bersih dengan nilai DLQ 2,730117784, sektor bangunan dengan nilai DLQ 1,39194077, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai DLQ sebesar 1,477634036 dan sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan dengan nilai DLQ 2,57070759 . Sektor pertanian untuk tahun berikutnya tidak dapat dijadikan sebagai sektor prioritas karena nilai DLQ nya kurang dari 1, atau masing-masing sebesar 0,65086804. Hal ini berarti proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo lebih lambat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa selama keadaan masih tetap bagaimana adanya, maka pada masa yang akan datang sektor tersebut akan kalah bersaing.

Sektor lain yang tidak dapat dijadikan sebagai sektor prioritas di tahun yang akan datang adalah sektor pertambangan dan penggalian, di mana untuk tahun-tahun sebelumnya sektor ini merupakan sektor prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai DLQ sebesar 0,94899069 yang berarti proporsi laju pertumbuhan sektor pertambangan dan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten

Purworejo lebih rendah dibanding proporsi laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB Jawa Tengah. Sektor-sektor yang lain masih belum bisa diharapkan sebagai sektor prioritas karena nilai DLQ nya kurang dari satu.

4.2.3.1 Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki nilai DLQ sebesar 1,511645705 yang berarti untuk masa yang akan datang sektor ini merupakan sektor basis dan dapat dijadikan sebagai sektor prioritas pembangunan. Sub sektor yang paling besar memberi peranan adalah sub sektor tekstil, pakaian jadi dengan nilai LQ 2,011, kemudian sub sektor Barang kayu dan hasil hutan dengan nilai LQ sebesar 1,58, dan yang terkecil adalah sub sektor Makanan, Minuman, dan tembakau dengan nilai LQ 1,5075.(lampiran 13)

4.2.3.2 Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan , persewaan bangunan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang memiliki nilai DLQ terbesar kedua , yaitu sebesar 2,57070759 (lampiran 13). Sub sektor yang banyak memberikan sumbangannya adalah sub sektor lembaga keuangan non bank yaitu sebesar 2,75094 (lampiran 13). Tabel 10 memperlihatkan bahwa semua sub sektor memiliki nilai DLQ lebih dari satu sehingga untuk masa yang akan datang semua sub sektor tersebut dapat dijadikan sebagai sub sektor basis.

Tabel 11. Hasil Perhitungan DLQ Sub Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993.

No.	Sub Sektor	DLQ
1.	Bank	- 3,19
2.	Lembaga Keuangan non Bank	- 2,9
3.	Sewa Bangunan	2,53
4.	Jasa Perusahaan	3,12

Sumber : Lampiran 8,9,10 di olah

4.2.3.3 Listrik , Gas , dan Air bersih

Sektor ini dapat di harapkan menjadi sektor prioritas di masa yang akan datang karena mempunyai nilai DLQ sebesar 2,730117784 (lampiran 13).Hal tersebut tidak terlepas dari sumbangan sub sektor nya, yaitu sub sektor listrik, sub sektor gas, dan air bersih.Besarnya sumbangan sub sektor tersebut dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Hasil perhitungan DLQ sektor Listrik , Gas, dan Air Bersih kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993

No.	Sub Sektor	DLQ
1.	Listrik	2,40
2.	Gas	2,67
3.	Air bersih	5,47

Sumber ; Lampiran 13

4.2.3.4 Sektor Bangunan

Sektor bangunan mempunyai nilai DLQ sebesar 1,39194077, berdasarkan nilai DLQ tersebut maka sektor bangunan dapat dijadikan sektor prioritas di masa yang akan datang.(lampiran 13)

4.2.3.5 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Nilai DLQ dari sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,477634036 menunjukkan bahwa sektor ini dapat dijadikan

prioritas pembangunan dimasa mendatang . Sub sektor yang paling besar memberi kontribusi adalah sub sektor pos dan telekomunikasi yaitu dengan nilai LQ sebesar 11, 5.(lampiran 13)

4.3 Analisis Shift Share

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan posisi dan reposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas sebab perubahan tersebut. Oleh karena itu perlu di ketahui penyebab terjadinya reposisi sektoral itu. Persoalan ini amat penting bagi daerah, terutama dalam mendeteksi kekuatan dan kelemahan daerah dalam proses reposisi tersebut. Pemahaman akan kekuatan akan menentukan kebijakan bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada untuk tetap memenangkan persaingan. Sebaliknya pemahaman akan kelemahan akan menentukan kebijakan bagaimana kelemahan tersebut di perbaiki agar secara gradual dapat di kurangi.

Kunci dasar dalam persaingan antar daerah bagian dalam daerah himpunan adalah mempertahankan agar laju pertumbuhan PDRB daerah bagian tidak sampai terkalahkan dengan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian yang lain dalam daerah himpunannya. Indikator dari kemampuan itu dinyatakan dalam indeks total keunggulan daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan laju pertumbuhan PDRB daerah himpunan yang mewakili rata rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian.

Dimana Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun (1997- 2001) mempunyai laju pertumbuhan rata- rata sebesar 2,38 % sedangkan Propinsi Jawa Tengah mempunyai laju pertumbuhan rata- rata 22,71 % (lampiran 8, 9) . Hal ini menunjukkan perbedaan

yang sangat mencolok dalam laju pertumbuhan rata - rata kabupaten Purworejo di banding dengan Propinsi Jawa Tengah. Indeks Total Keunggulan Daerah (ITKD) kabupaten purworejo terhadap propinsi jawa tengah sebesar - 0,2033. Dilihat dari nilai total shift share sumbangan faktor struktural paling besar memberi peranan karena nilai dari faktor struktural banyak yang mempunyai nilai positif kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu masing - masing sebesar - 0,1354 untuk sektor pertambangan dan penggalian dan - 0,0482 untuk sektor pengangkutan dan komunikasi. Faktor Lokasional mempunyai nilai negatif kecuali pada sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai 0,095 , hal tersebut dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel. 13 Faktor Struktural dan Faktor Lokasional Kabupaten DATI II Purworejo .

No. Lapangan Usaha	Faktor Struktural	Faktor Lokasional
1. Pertanian	0,0525	- 0,188
2. Pertambangan Dan Penggalian	-0,1354	- 0,205
3. Industri Peng Olahan	0,1052	- 0,1059
4. Listrik, gas Air bersih	0,072	- 0,0062
5. Bangunan	0,769	- 0,123
6. Perdagangan	0,0687	- 0,1618
7. Pengangkutan	-0,0482	- 0,1182
8. Keuangan	0,1144	0,0081
9. Jasa- jasa	0,1321	- 0,0951

Sumber ; Lampiran 11, 12 diolah

4.4 Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan sektor- sektor yang menjadi sektor basis atau sektor prioritas perlu dikembangkan lebih lanjut guna memberikan peranan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Purworejo merupakan sektor basis, kecuali untuk tahun 1999 di mana nilai LQ nya turun tapi tetap merupakan sektor dengan perolehan nilai LQ paling besar di antara sektor- sektor lainnya . Hal ini berarti bahwa sektor pertanian mampu melayani pasar daerah Purworejo dan pasar luar daerah Purworejo. Menurut Arsyad (1997 : 291) terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Khusus untuk Kabupaten Purworejo pembangunan sektor pertanian merupakan unsur pokok dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta merupakan usaha terpadu untuk memantabkan proses agro industri dalam arti perluasan industri yang mengolah hasil- hasil pertanian (BAPPEDA kab. Purworejo , 2001) . Dengan penetapan prioritas pembangunan pada sektor pertanian bukan berarti pemerintah Purworejo mengesampingkan sektor- sektor lainnya untuk dikembangkan, sebaliknya dengan pemerioritasan sektor pertanian dalam pembangunan, diharapkan dapat memberikan *spread effect* terhadap sektor- sektor lain sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dicapai bersamaan dengan semakin berkurangnya *kepincangan antar sektor*.

Potensi sektor jasa- ~~jasa~~ sebagai sektor prioritas relatif lebih kecil karena perolehan nilai LQ tiap tahun maupun nilai LQ rata-

ratanya lebih kecil dari nilai LQ sektor pertanian dengan nilai LQ rata-rata pertahun pada 1997- 2001 sebesar 1,989117637. Bila dibandingkan dengan sektor Listrik, gas, dan air bersih angka ini relatif sangat kecil dengan nilai LQ rata-rata sektor listrik, gas, dan air bersih selama 2001 sebesar 2,730117784.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ternyata mampu menjadi sektor prioritas mulai tahun 2000- 2001, sementara untuk sektor bangunan hanya mampu menjadi sektor prioritas mulai tahun 1998 dan tahun 2000 sehingga prioritas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Purworejo belum sebesar prioritas pada sektor pertanian sebagai sektor pemimpin (leading sector), namun bukan berarti pengembangan sektor ataupun sub sektor tersebut dikesampingkan. Pengembangan sektor atau sub sektor prioritas tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukakan karena adanya suatu proses " memilih " yang di sebabkan keterbatasan sumberdaya dan dana yang tersedia untuk dialokasikan pada pembangunan tersebut (Arsyad, 1997). Permasalahan alokasi ini merupakan masalah yang mendasar dalam usaha penerapan konsep pertumbuhan, di mana permasalahan umum yang terjadi di Indonesia adalah bahwa prioritas pembangunan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah tidak didukung oleh dana yang diperlukan untuk realisasinya.

Berdasarkan perhitungan DLQ yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa sektor pertanian yang selama ini menjadi prioritas pembangunan kabupaten Purworejo untuk masa yang akan datang tidak dapat lagi di harapkan menjadi tulang punggung. Hal ini sesuai dengan ramalan para ahli ekonomi di mana untuk masa yang akan datang peranan sektor primer dalam hal ini pertanian

akan menurun. Sektor – sektor yang dapat di harapkan menjadi sektor prioritas di masa yang akan datang industri pengolahan, sektor listrik , gas, dan air bersih , sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan , persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Meskipun rata- rata laju pertumbuhan sektor ini di Purworejo tidak begitu besar namun pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan dengan propinsi Jawa Tengah. Sektor di daerah bagian yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut di daerah himpunan, sekalipun belum merupakan sektor unggulan sekarang namun bila di masa yang akan datang keadaan tetap sama, maka di kemudian hari dapat diharapkan unggul (Yuwono, 1999: 48) . Sektor listrik, gas dan air bersih menempati urutan pertama disusul sektor keuangan,persewaan bangunan dan jasa perusahaan.

Hasbullah (1994 : 309) menyatakan bahwa alasan perlunya pengembangan sektor ataupun sub sektor prioritas tersebut karena pembangunan sektor atau sub sektor prioritas merupakan salah-satu jalur kegiatan dalam upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat , dalam arti tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu.Selain itu pengembangan sektor atau sub sektor prioritas mampu menciptakan keterkaitan yang sempurna dengan sektor-sektor non prioritas dalam arti memacu pengembangan sektor non prioritas dalam hal bertambahnya permintaan maupun meluasnya lapangan kerja baru. Peningkatan kaitan sektor yang saling mendukung ini pada gilirannya akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan sektor prioritas berikutnya.

Keterkaitan ini dimaksudkan sebagai proses perubahan peningkatan kemampuan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan

sendiri, sehingga meningkat menjadi pendayagunaan surplus untuk kepentingan perdagangan dan untuk diperjualbelikan yang ditandai oleh pemilikan faktor produksi sektor prioritas yang diarahkan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan perdagangan (Hasbullah ,1994: 312). Sehubungan dengan pendapat tersebut, pengembangan sektor prioritas di Kabupaten Purworejo dimaksudkan ; (1) untuk mencapai swa sembada ; (2) untuk keperluan pemasukan pendapatan dari luar daerah .Dengan demikian perlu diperhatikan hal pemilikan faktor produksi baik alam , manusia maupun modal yang mendukung berkembangnya sektor atau sub sektor prioritas bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Jika dilihat dari Indeks Total Keunggulan daerah Kabupaten Purworejo terhadap Propinsi Jawa tengah maka Kabupaten Purworejo dengan PDRB pada tahun 2001 sebesar Rp 959.062,82 juta maka Kabupaten Purworejo hanya mampu mendapat penghasilan sebesar Rp 194.977,47 juta atau sebesar 0,2033 % dari total PDRB. Hal tersebut karena Kabupaten Purworejo kalah bersaing secara keseluruhan dengan daerah- daerah lain di daerah himpunan. Seluruh sektor telah memberikan sumbangan pendapatan daerah , kendati kecil- kecil. Hal ini terjadi karena keuntungan struktural dipakai untuk menutup kerugian lokasional atau sebaliknya (lihat tabel 14).

Tabel 14. LQ dan SS Kabupaten Purworejo terhadap Propinsi Jawa Tengah menurut lapangan usaha , tahun 1997- 2001

No. Lapangan Usaha	LQ		Shift Säre (SS)		
	Statis	Dinamis	Struktural	Lokasioanal	Total
1. Pertanian	1,26	0,65	0,01	-0,18	-0,17
2. Pertambang.	1,87	0,94	-0,001	-0,20	-0,20
3. Industri	0,23	1,51	0,09	-0,10	-0,08
4. Listrik,airbers	0,92	2,73	0,19	-0,006	0,19
5. Bangunan	0,94	1,39	0,08	-0,12	-0,04
6. Perd, hotel,res.	0,75	0,95	0,04	-0,16	-0,12
7. Komunikasi	1,30	1,47	0,08	-0,11	-0,03
8. Keuangan	1,17	2,57	0,21	0,008	0,21
9. Jasa- jasa	1,98	0,62	0,10	-0,09	0,01

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Pemanfaatan keunggulan lokasionanal nampak pada sektor keuangan , persewaan dan jasa usaha, selain itu keunggulan lokasional tersebut terjadi karena :

- a) Kabupaten Purworejo terletak pada jalur regional yang menghubungkan propinsi Jawa Tengah dan DIY yang memberikan peluang memperoleh *tricle- down effect* dari aktivitas yang terjadi Yogyakarta – Purwokerto – Semarang. Namun yang menjadi tanda tanya justru sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak mampu memanfaatkan keunggulan lokasional ini . Hal ini disebabkan masalah pengembangan jasa pariwisata daerah yang amat tertinggal dibandingkan jasa pengembangan jasa lainnya.
- b) Di Kabupaten Purworejo terdapat perguruan tinggi , sehingga banyak penduduk daerah lain yang berkomunikasi ke Purworejo . Kedatangan mereka telah menghidupkan keseluruhan ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo. Inilah sebabnya mengapa

sektor bangunan, sektor listrik dan air bersih , sektort keuangan, persewaan dan jasa usaha, serta sektor pengangkutan mampu memberikan keuntungan daerah.

Tiga sektor yang memiliki keunggulan struktural adalah sektor Listrik, gas dan air bersih,sektor keuangan ,persewaan bangunan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa- jasa, namun secara lokasi ketiga sektor ini merugi. Dominasi tiga sektor dalam struktur ekonomi Kabupaten Purworejo memang mampu memberikan keuntungan struktural, namun dengan pengembangan lokasional yang tidak optimal justru merupakan beban daerah. Oleh karena itu pada masa mendatang harus dicarikan jalan yang lebih baik, agar pengembangan lokasional yang memberikan manfaat untuk kedua sektor ini . Dengan demikian keuntungan yang diperoleh Kabupaten Purworejo dari ketiga sektor ini akan menjadi lebih berarti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis LQ (Location Quetient) guna mencari sektor basis sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Purworejo, maka dapat diperoleh hasil bahwa : (1) tahun 1997 terdapat tiga sektor prioritas yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian , dan sektor jasa- jasa, (2) tahun 1998 terdapat empat sektor prioritas yaitu sektor pertanian, sektoe pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, dan sektor jasa- jasa, (3) tahun 1999 terdapat empat sektor prioritas yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor jasa- jasa, (4) tahun 2000 terdapat empat sektor prioritas yaitu sektor petanian ,sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor jasa- jasa, (5) tahun 2001 terdapat lima sektor prioritas yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian , sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa- jasa.
2. Berdasarkan hasil analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) guna mencari sektor basis sebagai prioritas pembangunan dimasa yang akan datang di kabupaten Purworejo maka dapat diketahui sektor yang potensial dijadikan sebagai sektor prioritas dimasa yang akan datang adalah sektor industri pengolahan dengan nilai DLQ 1,342668283, sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai LQ 2,46404605, sektor bangunan dengan nilai DLQ 1,39194077, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai DLQ sebesar

1,477634036 dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai DLQ sebesar 2,57070759.

3. Berdasarkan hasil analisis Shift share dapat diketahui bahwa ada beberapa sektor yang dapat di pertahankan untuk di jadikan sektor basis di masa yang akan datang yaitu sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa jasa. Kabupaten DATI II Purworejo hanya mampu menghasilkan masukan sebesar Rp. 194977,47 juta atau sebesar 0,233 % dari PDRB tahun 2001 dengan laju pertumbuhan selama lima tahun itu dibandingkan jika pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah , hal ini di sebabkan ITKD (indek total keunggulan daerah) lebih kecil dari nol, maka dapat di tafsirkan bahwa kabupaten purworejo secara keseluruhan kalah bersaing dengan daerah- daerah lain di daerah himpunan. Hanya ada tiga sektor (sektor listrik, gas dan air bersih, sektor jasa- jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) yang punya nilai shift share positif , tetapi tidak mampu untuk menutupi kelemahan sektor lain. Seluruh sektor tidak bisa memberikan sumbangan positif pada keuntungan daerah. Hal ini terjadi karena keuntungan struktural dipakai untuk menutup kerugian lokasional atau sebaliknya. Pemanfaatan keunggulan lokasional nampak pada beberapa sektor, yaitu sektor listrik dan air bersih , sektor keuangan, persewaan dan jasa usaha, serta sektor jasa- jasa . Kelemahan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo adalah kelemahan lokasional . Dominasi beberapa sektor ternyata mengurangi kemanfaatan sektor lain, sementara sektor yang dominan tidak memberikan keuntungan yang dominan karena laju pertumbuhan sektor ini kalah dengan

laju pertumbuhan sektor ini di daerah tingkat II di Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian perlu diadakan perubahan struktur dengan lebih memberdayakan sektor- sektor yang secara dinamis unggul, agar menjadi sektor dominan di kemudian hari

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka yang perlu dicermati oleh pemerintah kabupaten Purworejo serta pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan pembangunan di wilayah ini adalah :

1. Untuk mempercepat pembangunan di kabupaten Purworejo hendaknya dengan melihat potensi sektor tersebut (Sektor Listrik, Gas , dan Air bersih, Sektor Bangunan, dan Sektor Pengangkutan) sebagai leading sektor dalam pembangunan sehingga diharapkan mampu mendorong dan menarik sektor lain untuk ikut berkembang.
2. Koordinasi, intregasi, sinkronisasi antar sektor atau sub sektor yang satu dengan yang lain diusahakan semakin diperluas agar dapat saling menguntungkan dan menciptakan iklim perkembangan yang serasi, oleh karena itu perlu kerja sama antar unsur pemerintah daerah dengan pihak swasta agar dapat mengembangkan potensi yang ada di kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE- YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Purworejo, 2001, *Kabupaten Purworejo Dalam Angka*, Purworejo.
- Bappeda Kabupaten Purworejo, *PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 1997- 2001*, Purworejo.
- Dajan, A, 1988, *Pengantar Metode Statistik I* , LP3ES, Jakarta.
- Gllason, J, 1977, *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, LP3ES, Jakarta.
- Kadariah, 1972, *Perencanaan Pembangunan Regional*, LPFE- UI, Jakarta.
- PEMDA Kabupaten Purworejo, 2001, *Data Pokok Pembangunan di Kabupaten Purworejo*, PEMDA, Purworejo.
- Sukirno,S , 1985, *Ekonomi Pembangunan*, UI- Press, Jakarta.
- Tjokroamidjojo,B, 1976, *Perencanaan Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Todaro, M, 1983, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Terjemahan Amirudin dan Drs. Mursyid.
- Utama , Suyana, 1995, " Sumbangan Sektor- Sektor Ekonomi Propinsi Bali Terhadap Pembangunan Nasional " , dalam *Majalah Ilmiah Unud*, no. 43 th. XXII, Bali.
- Waparni, 1984, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB, Bandung.
- Yuwono, Prapto, 1999, " Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/ 1999 dan UU 25/1999 " , dalam *Majalah Kritis*, volume XII no. 2 , Yogyakarta.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
 ATAS DASAR HARGA KONSTANT TAHUN 1993
 DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 1997 – 2001 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	457.652,46	466.298,00	470.305,25	471.764,56	492.662,34
a. tanaman bahan makanan	159.345,75	160.231,28	164.195,39	159.160,72	169.230,06
b. Tanaman Perkebunan	38.786,03	39.167,45	39.669,57	38.226,69	41.072,45
c. Peternakan	9.975,16	10.235,14	12.116,23	19.083,22	26.050,21
d. Kehutanan	11.673,43	12.387,19	12.837,24	12.795,29	12.879,19
e. Perikanan	6.004,88	6.073,43	6.334,21	6.576,36	6.818,51
2. Pertambangan dan Galian	17.977,56	18.855,64	19.116,92	22.275,54	25.434,16
3. Industri pengolahan	46.938,60	48.034,27	48.997,15	49.897,59	50.798,03
4. Listrik, gas dan air bersih	5.012,85	5.669,75	6.868,52	7.776,55	8.684,58
5. Bangunan	31.301,83	32.931,84	33.743,58	32.884,94	34.602,12
6. Perdagangan, hotel, dan restoran	120.838,14	121.435,73	122.689,49	124.255,95	125.822,41
7. Pengangkutan dan komunikasi	31.851,76	32.781,69	34.855,40	39.964,19	45.072,98
8. Keuangan, persewaa dan jasa perusahaan	26.256,84	27.631,14	28.875,87	31.795,00	34.714,13
9. Jasa-jasa	134.786,28	135.665,27	137.877,27	139.574,67	141.272,07
Produk Domestik Regional Bruto	872.616,32	886.303,33	903.329,43	920.188,99	959.062,82

Sumber data : Kantor Statistik KAB Purworejo, 2001

Lampiran 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian	13.184.650,58	21.836.268,05	25.376.849,32	26.103.392,46	26.737.485,07
a. tanaman bahan makanan	9.117.062,28	16.592.232,00	19.340.667,48	20.504.327,71	21.179.056,84
b. Tanaman Perkebunan	785.265,005	1.235.296,87	1.257.885,40	1.379.045,02	1.501.143,13
c. Peternakan	1.879.276,37	1.920.454,71	2.666.945,60	2.982.030,54	3.018.014,61
d. Kehutanan	743.171,60	809.955,31	760.731,59	830.831,59	871.937,65
e. Perikanan	669.884,33	1.278.289,16	1.350.619,35	1.686.76,64	1.894.756,17
2. Pertambangan dan Galian	686.150,87	900.518,96	1.016.023,22	- 1.783.150,21	1.933.826,58
3. Industri pengolahan	19.308.930,98	23.351.723,43	29.543.972,67	30.351.406,17	31.021.856,32
4. Listrik, gas dan air bersih	444.190,21	573.099,51	655.019,16	702.635,35	786.387,71
5. Bangunan	2.616.619,67	3.004.664,35	3.982.983,09	4.290.145,96	4.553.845,32
6. Perdagangan, hotel, dan restoran	12.707.578,62	19.902.988,40	23.288.124,97	23.687.044,48	23.978.165,83
7. Pengangkutan dan komunikasi	2.315.867,95	3.376.161,43	4.172.495,40	4.683.158,80	4.937.863,45
8. Keuangan, persewaa dan jasa perusahaan	3.287.068,51	3.101.736,67	3.700.158,84	3.976.163,64	4.216.178,32
9. Jasa-jasa	6.745.369,68	8.363.151,81	9.637.665,56	9.965.736,01	10.127.007,7
Produk Domestik Regional Bruto	60.296.246,87	84.610.222,51	101.373.292,68	105.542.833,1	108.292.009,3

Sumber data : Kantor statistik KAB Purworejo, 2001

Lampiran 3. Perhitungan LQ Tahun 1997 KAB. Purworejo atas Dasar Harga Konstan 1993

NO	Lapangan Usaha	PDRB PWR	X1 / Yn	PDRB JATENG	X / Y	LQ
1.	Pertanian	457.652,46	0,524446012	13.184.050,58	0,218663878	2,398
2.	Pertambangan dan pengalihan	17.977,56	0,020601906	686.150,87	0,011379627	1,810420148
3.	Industri pengolahan	46.938,60	0,05379065	19.308.930,98	0,320233419	0,167973255
4.	Listrik, gas dan air bersih	5.012,85	0,057446414	444.190,21	0,07366774	0,779804212
5.	Bagunan	31.301,83	0,03587124	2.616.619,67	0,043395932	0,826603747
6.	Perdagangan, hotel dan restaurant	120.838,14	0,138477973	12.707.578,95	0,210751774	0,65706670
7.	Pengangkutan dan komunikasi	31.851,76	0,036501448	2.315.867,95	0,038408046	0,950359911
8.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	26.256,84	0,030089787	3.287.068,51	0,054515145	0,551952801
9.	Jasa-jasa	134.786,28	0,154462245	6.745.369,68	0,111870139	1,380728105
Total PDRB		872.616,32		60.296.426,87		

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 4. Perhitungan LQ Tahun 1998 KAB. Purworejo atas Dasar Harga Konstant 1993.

NO	Lapangan Usaha	PDRB PWR	X1 / Yn	PDRB JATENG	X / Y	LQ
1.	Pertanian	46.298,00	0,522730745	21.836.268,05	0,25808037	2,025
2.	Pertambangan dan pengalihan	18.585,64	0,020969841	900.518,96	0,010643146	1,970267156
3.	Industri pengolahan	48.034,27	0,054196197	23.351.723,43	0,27599175	0,196368902
4.	Listrik, gas dan air bersih	5.669,75	0,006397	573.099,51	0,006772343	0,944577083
5.	Be gunan	32.931,84	0,037156398	3.004.664,35	0,035511836	1,04631025
6.	Perdagangan, hotel dan restaurant	121.435,73	0,137013735	19.902.988,40	0,235231486	0,582463416
7.	Pengangkutan dan komunikasi	32.781,69	0,036986987	3.676.161,43	0,043448194	0,8512894
8.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	27.631,14	0,031175714	3.101.736,67	0,036659124	0,85421684
9.	Jasa-jasa	135.665,27	0,153068667	8.363.151,81	0,098843278	1,548599663
Total PDRB		886.303,33		84.610.222,51		

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 5. Perhitungan LQ Tahun 1999 KAB. Purworejo Atas Dasar Harga Konstant 1993

NO	Lapangan Usaha	PDRB PWR	X1 / Yn	PDRB JATENG	X / Y	LQ
1.	Pertanian	470.305,25	0,520635367	25.376.849,32	0,250330719	2,079
2.	Pertambangan dan pengalihan	19.116,92	0,021162733	1.016.023,22	0,010022592	2,111502992
3.	Industri pengolahan	48.997,15	0,05424062	29.543.972,67	0,291437437	0,186114112
4.	Listrik, gas dan air bersih	6.868,52	0,00760356	655.019,16	0,006461458	1,176756082
5.	Bagunan	33.743,53	0,037354622	3.982.983,09	0,03929026	0,950734915
6.	Perdagangan, hotel dan restaurant	122.689,49	0,1358192	23.288.124,97	0,229726433	0,591199707
7.	Pengangkutan dan komunikasi	34.855,40	0,03858548	4.172.495,40	0,04115971	0,937457528
8.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	28.875,87	0,031966045	3.700.158,84	0,036500332	0,875774088
9.	Jasa-jasa	137.877,27	0,152632323	9.637.665,56	0,095071051	1,605455303
Total PDRB		903.329,43		101.373.292,68		

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 6 Perhitungan LQ Tahun 2000 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993

No	Lapangan Usaha	PDRB PWR	X1 / Yn	PDRB JATENG	X / Y	LQ
1.	Pertanian	471.764,56	0,512582246	26.103.392,46	0,247325106	2,07
2.	Pertambangan dan pengalihan	22.275,54	0,02420757	1.783.150,21	0,016895038	1,43
3.	Industri pengolahan	49.897,59	0,054225371	30.351.406,17	0,287574298	0,88
4.	Listrik, gas dan air bersih	7.776,55	0,008451035	702.635,35	0,006657347	1,27
5.	Bagunan	32.884,94	0,035737158	4.290.145,96	0,040648387	0,87
6.	Perdagangan, hotel dan restaurant	124.225,95	0,135033076	23.687.044,48	0,224430629	0,60
7.	Pengangkutan dan komunikasi	39.964,19	0,043430415	4.683.158,80	0,044372115	0,97
8.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	31.795,00	0,034552684	3.397.163,64	0,037673459	0,92
9.	Jasa-jasa	139.574,67	0,151680439	9.965.736,01	0,094423616	1,61
Total PDRB		920.188,99		105.542.833,1		

Sumber lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 7. Perhitungan LQ Tahun 2001 Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan 1993

NO	Lapangan Usaha	PDRB PWR	X1 / Yn	PDRB JATENG	X / Y	LQ
1.	Pertanian	492.662,34	0,513691418	26.737.485,07	0,246900367	2,08
2.	Pertambangan dan pengalihan	25.434,16	0,026519806	1.933.856,58	0,017857419	1,48
3.	Industri pengolahan	50.798,03	0,05966321	31.021.8561,32	0,286463282	0,21
4.	Listrik, gas dan air bersih	8.684,58	0,009055277	786.387,71	0,007261693	1,25
5.	Bagunan	34.602,12	0,036079096	1.553.854,32	0,042051302	0,86
6.	Perdagangan, hotel dan	125.822,41	0,13193084	23.978.165,83	0,22142015	0,60
7.	restaurant	45.072,98	0,0469969	4.937.863,45	0,045597418	1,03
8.	Pengangkutan dan komunikasi	34.714,13	0,036195887	4.216.178,32	0,038933204	0,93
9.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	141.714,13	0,147302207	10.127.483,72	0,09351516	1,57
	Jasa-jasa					
	Total PDRB	959.062,82		108.292.009,3		

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 8 Perhitungan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Persektor Tahun 1997-2001
Kabupaten Purworejo ADHK 1993.

No	Lapangan Usaha	PDRB 1997(Pi)	PDRB 2001 (Pn)	Pn / Pi	g (%)
1.	Pertanian	457.652,46	463.298,00	1,796003759	1,01
2.	Pertambangan dan pengalihan	17.977,56	25.434,16	1,414772639	9,06
3.	Industri pengolahan	46.938,60	50.798,03	1,082222947	1,99
4.	Listrik, gas dan air bersih	5.021,85	8.684,58	1,732463569	14,73
5.	Bagunan	31.301,83	34.602,12	1,105434411	2,54
6.	Perdagangan, hotel dan restaurant	120.838,14	125.822,41	1,04124749	1,01
7.	Pengangkutan dan komunikasi	31.851,76	45.072,98	1,415086011	9,06
8.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa per isahaan	26.256,84	34.714,13	1,322098547	7,23
9.	Jasa-jasa	134.786,28	141.272,07	1,048119067	2,39
Total PDRB		872.616,32	959.062,82	1.099065876	2,39

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 9 perhitungan rata-rata laju pertumbuhan persektor tahun 1997-2001

Propinsi JAWA TENGAH

No	Lapangan Usaha	PDRB 1997 (Pi)	PDRB (Pn)	Pn/Pi	g (%)
1.	Pertanian	13.184.050,58	26.737.485,07	2,027925193	19,33
2.	Pertambangan dan pengalihan	686.150,87	1.933.826,58	2,818369348	29,57
3.	Industri pengolahan	19.308.930,98	31.021.856,32	1,606606619	12,58
4.	Listrik, gas dan air bersih	444.190,21	786.387,71	1,770385056	15,35
5.	Bagunan	2.616.619,67	4.553.845,32	1,74035431	14,86
6.	Perdagangan, hotel dan restaurant	12.707.578,62	23.978.165,83	1,88691855	17,20
7.	Pengangkutan dan komunikasi	2.315.867,95	4.937.863,45	2,132186963	20,84
8.	Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan	3.287.068,51	4.216.178,32	1,282656053	6,42
9.	Jasa-jasa	6.745.369,68	10.127.483,72	1,501397877	10,69
T O T A L		60.296.426,87	108.292.009,3	1,796003759	22,72

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 11. Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi dan Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan Tahun 1997 – 2001 Kab. Purworejo ADHK 1993

No.	Lapangan Usaha	PDRB 1997 (P ₁)	PDRB 2001 (P _n)	P _n /P ₁	g (%)
1.	Industri Pengolahan	46.938,60	46.938,60	1,082222947	1,99
	3.1 Makanan, minuman dan tembakau	6.561,85	6.561,85	1,244514885	5,62
	3.2 Tekstil, pakaian jadi	40.736,75	40.736,75	1,055847982	1,36
	3.3 Barang kayu dan hasil hutan lain	0	0	0	0
	3.4 Kertas dan barang cetakan	0	0	0	0
	3.5 Pupuk, kimia dan barang dari karet	0	0	0	0
	3.6 Semen dan barang galian non logam	0	0	0	0
2.	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.012,85	8.684,58	1,732463569	14,73
	4.1 Listrik	4.007,17	6.115,73	1,526196792	11,15
	4.3 Air bersih	1.003,68	2.568,85	2,559431293	26,50
3.	Bangunan	31.301,83	34.602,12	1,105434411	2,54
4.	Pengangkutan dan Komunikasi	31.851,76	45.072,98	1,415086011	9,07
	a. Angkutan	29.785,18	35.773,27	1,201042599	4,69
	1. Angkutan rel	1.024,11	2.565,03	2,504643056	25,80
	2. Angkutan jalan raya	900,00	3.083,38	3,425977778	36,05
	3. Jasa penunjang angkutan	27.861,07	30.124,88	1,081253522	1,97
	b. Komunikasi	2.006,58	9.299,71	4,500048389	45,64
	1. Pos dan telekomunikasi	2.000,58	7.381,60	3,689729978	38,59
	2. Jasa penunjang telekomunikasi	1.006,01	1.918,11	1,799335841	15,82
5.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	26.256,84	34.714,13	1,322098547	7,23
	8.1 Bank	14.376,16	21.897,63	1,523190476	11,09
	8.2 Lembaga keuangan tanpa bank	4.853,07	5.931,50	1,222216041	5,14
	8.4 Sewa bangunan	3.677,45	3.883,17	1,055940937	1,37
	8.5 Jasa perusahaan	3.350,16	3.001,83	0,896025861	-2,70
	Total PDRB	872.616,32	954.062,82	1,099065876	2,38

Sumber : Lampiran 1 (diolah)

Lampiran 11. Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi dan Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan Tahun 1997 – 2001 Kab. Purworejo ADHK 1993

No.	Lapangan Usaha	PDRB 1997 (P ₁)	PDRB 2001 (P _n)	P _n /P ₁	g (%)
1.	Industri Pengolahan	46.938,60	46.938,60	1,082222947	1,99
	3.1 Makanan, minuman dan tembakau	6.561,85	6.561,85	1,244514885	5,62
	3.2 Tekstil, pakaian jadi	40.736,75	40.736,75	1,055847982	1,36
	3.3 Barang kayu dan hasil hutan lain	0	0	0	0
	3.4 Kertas dan barang cetakan	0	0	0	0
	3.5 Pupuk, kimia dan barang dari karet	0	0	0	0
	3.6 Semen dan barang galian non logam	0	0	0	0
2.	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.012,85	8.684,58	1,732463569	14,73
	4.1 Listrik	4.007,17	6.115,73	1,526196792	11,15
	4.3 Air bersih	1.003,68	2.568,85	2,559431293	26,50
3.	Bangunan	31.301,83	34.602,12	1,105434411	2,54
4.	Pengangkutan dan Komunikasi	31.851,76	45.072,98	1,415086011	9,07
	a. Angkutan	29.785,18	35.773,27	1,201042599	4,69
	1. Angkutan rel	1.024,11	2.565,03	2,504643056	25,80
	2. Angkutan jalan raya	900,00	3.083,38	3,425977778	36,05
	3. Jasa penunjang angkutan	27.861,07	30.124,88	1,081253522	1,97
	b. Komunikasi	2.006,58	9.299,71	4,500048389	45,64
	1. Pos dan telekomunikasi	2.000,58	7.381,60	3,689729978	38,59
	2. Jasa penunjang telekomunikasi	1.006,01	1.918,11	1,799335841	15,82
5.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	26.256,84	34.714,13	1,322098547	7,23
	8.1 Bank	14.376,16	21.897,63	1,523190476	11,09
	8.2 Lembaga keuangan tanpa bank	4.853,07	5.931,50	1,222216041	5,14
	8.4 Sewa bangunan	3.677,45	3.883,17	1,055940937	1,37
	8.5 Jasa perusahaan	3.350,16	3.001,83	0,896025861	-2,70
	Total PDRB	872.616,32	954.062,82	1,099065876	2,38

Sumber : Lampiran 1 (diolah)

Lampiran 13. Perhitungan DLQ Sub Sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi dan Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan Tahun 1997 – 2001 Kab. Purworejo

No.	Lapangan Usaha	$(1 + g_{in} / (1 + g_n))$	$(1 + G_i) / (1 + G)$	DLQ
1.	Industri Pengolahan	0,996	0,9175	1,5075
	3.1 Makanan, minuman dan tembakau.	1,0316	0,897	2,011
	3.2 Tekstil, pakaian jadi	0,990	0,9033	1,58
	3.3 Barang kayu dan hasil hutan lain	0	-	-
	3.4 Kertas dan barang cetakan	0	-	-
	3.5 Pupuk, kimia dan barang dari karet	0	-	-
	3.6 Semen dan barang galian non logam	0	-	-
2.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,1206	0,940	2,40
	4.1 Listrik	1,0856	0,892	2,67
	4.2 Air bersih	1,235	0,879	5,47
	4.3 Gas	0	-	-
3.	Bangunan	1,002	0,936	1,40
4.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,065	0,984	1,485
	a. Angkutan	1,0225	0,907	1,82
	1. Angkutan rel	1,229	0,863	5,85
	2. Angkutan jalan raya	1,328	0,827	1,06
	3. Jasa penunjang angkutan	0,995	0,87	1,04
	b. Komunikasi	1,423	0,87	11,7
	1. Pos dan telekomunikasi	1,3536	0,83	11,5
	2. Jasa penunjang telekomunikasi	1,3536	0,82	4,9
5.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	1,0473	0,867	2,57
	8.1 Bank	1,085	-0,86	-3,19
	8.2 Lembaga keuangan tanpa bank	1,026	-0,824	-2,9
	8.3 Sewa bangunan	0,990	0,822	2,53
	8.5 Jasa perusahaan	1,045	0,832	3,12

Sumber : Lampiran 11, 12 (diolah)

Lampiran 13. Perhitungan DLO Sub Sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi dan Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan Tahun 1997 – 2001 Kab. Purworejo

No.	Lapangan Usaha	$(1 + gin) / (1 + gn)$	$(1 + Gi) / (1 + G)$	DLO
1.	Industri Pengolahan	0,996	0,9175	1,5075
	3.1 Makanan, minuman dan tembakau	1,0316	0,897	2,011
	3.2 Tekstil, pakaian jadi	0,990	0,9033	1,58
	3.3 Barang kayu dan hasil hutan lain	0	-	-
	3.4 Kertas dan barang cetakan	0	-	-
	3.5 Pupuk, kimia dan barang dari karet	0	-	-
	3.6 Semen dan barang galian non logam	0	-	-
2.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,1206	0,940	2,40
	4.1 Listrik	1,0856	0,892	2,67
	4.2 Air bersih	1,235	0,879	5,47
	4.3 Gas	0	-	-
3.	Bangunan	1,002	0,936	1,40
4.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,065	0,984	1,485
	a. Angkutan	1,0225	0,907	1,82
	1. Angkutan rel	1,229	0,863	5,85
	2. Angkutan jalan raya	1,328	0,827	1,06
	3. Jasa penunjang angkutan	0,995	0,87	1,04
	b. Komunikasi	1,423	0,87	11,7
	1. Pos dan telekomunikasi	1,3536	0,83	11,5
	2. Jasa penunjang telekomunikasi	1,3536	0,82	4,9
5.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	1,0473	0,867	2,57
	8.1 Bank	1,085	-0,86	-3,19
	8.2 Lembaga keuangan tanpa bank	1,026	-0,824	-2,9
	8.3 Sewa bangunan	0,990	0,822	2,53
	8.5 Jasa perusahaan	1,045	0,832	3,12

Sumber : Lampiran 11, 12 (diolah)

